

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Sekunder

Data sekunder berisikan sumber informasi yang berharga dalam penelitian dan analisis, merujuk kepada data yang telah diperoleh dari sumber yang ada sebelumnya. Data sekunder yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain oleh orang atau organisasi lain. Penggunaan data sekunder dapat memiliki beberapa tujuan yang bergantung pada topik penelitian dan metodologi yang digunakan.

1. Kondisi Geografis Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan adalah satu dari empat kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Wilayah ini memiliki luas keseluruhan sekitar 792,3 kilometer persegi yang di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur Kabupaten Sumenep, di sebelah selatan Selat Madura, dan Kabupaten Sampang di sebelah barat. Kecamatan Pamekasan, berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten, memiliki wilayah yang paling kecil dengan luas sekitar 2.647 hektar, setara dengan 3,34% dari total wilayah. Secara umum terdapat dataran rendah di bagian selatan dan wilayah tengah dan utara terdapat dataran tinggi, dengan kemiringan lahan yang tidak melebihi 2%. Letak geografis Kabupaten Pamekasan antara 6°51' - 7°31' lintang selatan dan 113°19' hingga 113°58' bujur timur. Kemiringan lahan mendominasi berkisar antara 0 hingga 15 derajat, dengan luas mencapai 59.964 hektar. Sementara itu, tingkat kemiringan antara 15 hingga 25 derajat merupakan

yang terbesar kedua, mencakup luas sekitar 14.291 hektar. Adapun area dengan kemiringan antara 25 hingga 40 derajat memiliki luas sekitar 2.253 hektar, dan yang memiliki kemiringan lebih dari 40 derajat mencakup area seluas 2.722 hektar. Luas total dari berbagai tingkat kemiringan lahan ini mencapai 79.230 hektar.

Kabupaten Pamekasan adalah wilayah yang secara umum memiliki topografi datar, dengan tinggi berkisar antara 0-350 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi di wilayah ini terletak di Kecamatan Pengantenan, berada pada ketinggian 312 meter dpl. Di sisi lain, titik terendah terdapat di Kecamatan Galis, dengan ketinggian hanya sekitar 6 meter dpl. Perbedaan ketinggian wilayah yang signifikan ini menyebabkan setiap kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi potensi maupun mata pencaharian penduduknya.

Geologi Kabupaten Pamekasan memengaruhi keberadaan SDA yang mencakup berbagai jenis bahan tambang seperti, Holosen Alluvium, Miosen Sedimentary Facies, Pliosen Limestone Facies, dan Cleiston Clay Sedimentary. Kabupaten Pamekasan memiliki beragam jenis tanah, termasuk Aluvial, Glei, Planosol, Podsolik, dan Laterit Grumosol, Hidromorf Kelabu. Sumber daya alam yang dapat ditemukan di wilayah ini mencakup minyak bumi, pasir kuarsa, lempung sedimen, batu gamping, oker, gipsum, dan fosfat.

2. Visi Dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, serta mempertimbangkan aspirasi

sosial-politik, telah ditetapkan visi dan misi yang dapat diakses melalui *website* <https://ppid.pamekasankab.go.id/visi-misi/> sebagai pedoman untuk pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan dari tahun 2005-2025.

Visi : *“Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT”*

Pengertian dari Visi di atas: Mewujudkan kemajuan yang mencakup aspek sosial-ekonomi, budaya, hukum, dan politik menuju keadaan lebih baik. Selain itu, visi ini menggambarkan komitmen untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan pertumbuhan, terutama dalam hal pemasaran produk dan investasi.

Visi ini juga mencakup pendekatan pembangunan yang berfokus pada pertanian berkelanjutan dan ekonomi kelautan, didukung oleh infrastruktur pedesaan yang memadai dan berusaha untuk mendapatkan petunjuk dan Ridho Allah SWT.

Sementara itu, menurut RPJP Nasional dan RPJPD Jawa Timur, terdapat Misi Pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan dari tahun 2005 hingga 2025 mencakup sejumlah langkah strategis berikut:

- a. Peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat dengan mematuhi dan mengamalkan prinsip-prinsip agama sesuai petunjuk dan ridho Allah SWT.
- b. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta memastikan aksesibilitas yang merata bagi masyarakat tanpa adanya diskriminasi.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada sektor pertanian dan perkotaan, serta mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi manusia.

- d. Pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan daya saing investasi, pengelolaan SDA, dan perencanaan tata ruang yang sesuai potensi dan sumber daya lokal.
- e. Upaya aktif dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan wilayah, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memberikan peluang kerja yang mencukupi.
- f. Menciptakan kondisi ketertiban sosial dan ketertiban umum, dan memastikan keberlakuan hukum yang adil, transparan, dan profesional.
- g. Melakukan reformasi birokrasi untuk menjadikannya lebih profesional dan bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- h. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh lembaga pelayanan publik.

3. Deskripsi Data Sekunder terkait Variabel

Dalam penelitian ini melibatkan data pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan periode tahun 2017-2021. Data sekunder ini didapat dari laporan keuangan pemerintah kabupaten Pamekasan yang dapat diakses melalui *website* resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di <https://keuanganpamekasankab.com/v2/statis-20-lkpd-yang-sudah-diaudit.html>. Berikut adalah data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan periode tahun 2017-2021:

Tabel 4. 1 Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017-2021
(dalam Rp)

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.858.293.158.524	1.761.281.131.744	1.912.582.902.152	1.843.304.975.337	1.937.021.014.573
	Pendapatan Asli Daerah	220.745.963.384	179.974.568.986	177.941.072.561	182.735.353.662	206.868.469.937
	Pendapatan Transfer	1.580.632.285.140	1.499.510.422.758	1.658.749.750.591	1.589.769.454.675	1.631.167.747.628
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	56.914.910.000	81.796.140.000	75.892.079.000	70.800.167.000	98.984.797.008
2	Belanja	1.778.468.675.988	1.876.057.427.136	2.047.415.007.096	2.139.405.190.525	1.939.536.334.871
	Belanja Operasi	1.273.602.875.025	1.407.610.194.927	1.486.333.903.668	1.442.448.190.494	1.550.057.811.967
	Belanja Modal	499.065.800.963	465.047.232.209	555.981.103.428	626.844.536.661	372.896.550.597
	Belanja Tidak Terduga	5.800.000.000	3.400.000.000	5.100.000.000	70.112.463.370	16.581.972.307
3	Transfer	259.643.542.421	262.070.135.428	353.970.202.930	316.306.997.426	309.590.225.056
	Surplus (Defisit)	-179.819.059.885	-376.846.430.820	-488.802.307.874	-612.407.212.614	-312.105.545.354
4	Pembiayaan					
	Penerimaan Pembiayaan	198.319.059.885	391.755.887.815	511.391.307.874	629.907.632.159	313.874.652.507
	Pengeluaran Pembiayaan	18.500.000.000	14.909.456.995	22.589.000.000	17.500.419.545	1.769.107.153
	Pembiayaan Netto	179.819.059.885	376.846.430.820	488.802.307.874	612.407.212.614	312.105.545.354
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Kabupaten Pamekasan, diolah penulis 2023

Tabel 4. 2
Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017-2021
(dalam Rp)

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.906.203.284.544	1.841.101.038.915	1.920.014.132.343	1.824.167.916.967	1.879.358.460.454
	Pendapatan Asli Daerah	243.311.843.020	222.410.664.049	219.671.437.717	232.262.477.005	205.969.039.947
	Pendapatan Transfer	1.603.536.691.024	1.542.898.734.866	1.629.757.515.626	1.522.615.925.862	1.596.381.889.771
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	59.354.750.500	75.791.640.000	70.585.179.000	69.289.514.100	77.007.530.736
2	Belanja	1.463.511.253.200	1.458.086.461.650	1.634.657.350.343	1.745.260.812.350	1.677.957.238.099
	Belanja Operasi	1.088.706.942.368	1.137.378.297.494	1.230.921.916.217	1.239.889.477.520	1.342.670.602.291
	Belanja Modal	372.031.422.732	317.340.696.506	399.606.369.876	462.851.108.600	319.197.803.842
	Belanja Tidak Terduga	2.772.888.100	3.367.467.650	4.129.064.250	42.520.226.230	16.088.831.966
3	Transfer	255.992.851.546	261.233.249.649	314.492.457.715	313.857.408.468	300.746.605.996
	Surplus (Defisit)	186.699.179.799	121.781.327.616	-29.135.675.715	-234.950.303.852	-99.345.383.641
4	Pembiayaan					
	Penerimaan Pembiayaan	198.329.059.885	394.603.462.164	511.632.307.874	564.824.956.360	313.887.052.508
	Pengeluaran Pembiayaan	15.388.613.622	4.993.481.905	2.589.000.000	16.000.000.000	345.862.473
	Pembiayaan Netto	182.940.446.263	389.609.980.258	509.043.307.874	548.824.956.360	313.541.190.035
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	369.639.626.062	511.391.307.874	479.907.632.160	313.874.652.508	214.195.806.394

Sumber: LRA Kabupaten Pamekasan, diolah penulis, 2023

Tabel 4.1 dan 4.2 merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017- 2021. Kedua tabel tersebut menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pamekasan meliputi Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif.

a. Pendapatan daerah Kab Pamekasan terdiri dari tiga sumber antara lain;

1. Pendapatan Asli Daerah

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d) Lain-lain PAD yang sah

2. Pendapatan Transfer

- a) Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan
- b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
- c) Transfer Pemerintah Provinsi

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Pendapatan Hibah
- b) Pendapatan Lainnya

b. Pengeluaran daerah Kab Pamekasan terdiri dari belanja dan transfer;

1) Belanja

- a) Belanja Operasi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Keuangan.

- b) Belanja Modal : Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- c) Belanja Tidak Terduga

2) Transfer

- a) Transfer/Bagi Hasil Ke Desa
- b) Transfer Bantuan Keuangan

Dalam Tabel 4.3 yang terlampir di bawah ini, disajikan data mengenai pendapatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama periode TA 2017-2021. Tabel tersebut memuat informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan pada setiap tahun anggaran tersebut. Data ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pamekasan dan telah diolah oleh penulis pada tahun 2023. Tabel ini menjadi sumber informasi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Pamekasan selama TA 2017-2021.

Tabel 4. 3
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017-2021
(dalam Rp)

Tahun	Pendapatan	
	Anggaran	Realisasi
2017	1.858.293.158.524,00	1.906.203.284.544,28
2018	1.761.281.131.744,00	1.841.101.038.915,09
2019	1.912.582.902.152,00	1.920.014.132.343,13
2020	1.843.304.975.337,00	1.824.167.916.966,71
2021	1.937.021.014.573,00	1.879.358.460.450,00

Sumber: LRA Kabupaten Pamekasan, diolah penulis 2023

Dalam Tabel 4.4 berikut ini, tersaji data mengenai pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama rentang waktu TA 2017-2021. Tabel ini memuat

informasi terkait anggaran yang dialokasikan dan realisasi pengeluaran pada setiap tahun anggaran tersebut.

Tabel 4. 4
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017-2021
(dalam Rp)

Tahun	Belanja dan Transfer	
	Anggaran	Realisasi
2017	2.038.112.218.409,00	1.719.504.104.745,23
2018	2.138.127.562.564,00	1.719.319.711.299,32
2019	2.401.385.210.026,00	1.949.149.808.057,85
2020	2.455.712.187.951,00	2.059.118.220.818,57
2021	2.249.126.559.927,00	1.978.703.844.095,13

Sumber: LRA Kabupaten Pamekasan, diolah penulis 2023

Tabel 4.3 menggambarkan pendapatan yang dianggarkan dan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama periode lima tahun (TA 2017-2021). Pada tahun 2017, anggaran pendapatan sekitar Rp1.858 Triliun, sedangkan realisasi pendapatan mencapai Rp1.906 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima lebih tinggi daripada yang direncanakan dan menunjukkan performa yang baik pada tahun tersebut. Pada tahun 2018, meskipun pendapatan yang direncanakan lebih rendah Rp1.761 Triliun, realisasi pendapatan lebih tinggi, sebesar Rp1.841 Triliun. Ini menunjukkan kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 menunjukkan sedikit kenaikan antara anggaran pendapatan Rp1.912 Triliun dan realisasi Rp1.920 Triliun, menunjukkan konsistensi dalam pencapaian pendapatan. Tahun 2020 mengalami penurunan realisasi pendapatan menjadi Rp1.824 Triliun, sedangkan anggaran pendapatan sebesar Rp1.843 Triliun. Tahun 2021, pendapatan yang direncanakan adalah sekitar Rp1.937 Triliun, sedangkan realisasi pendapatan mencapai sekitar Rp1.879 Triliun.

Tabel 4.4 memberikan informasi tentang anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama periode lima tahun, yaitu dari 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, anggaran pengeluaran adalah Rp2.038 Triliun, sedangkan realisasi pengeluaran Rp1.719 Triliun. Ini menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran lebih rendah daripada yang dianggarkan pada tahun tersebut. Pada tahun 2018, pengeluaran yang dianggarkan sekitar Rp2.138 Triliun dan realisasi jumlahnya lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.719 Triliun.

Pada tahun 2019, anggaran pengeluaran meningkat menjadi Rp2.401 triliun, dan realisasi pengeluaran juga meningkat menjadi Rp1.949 triliun. Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 mencatat anggaran awal sebesar Rp2.455 triliun, dan realisasi kembali mengalami peningkatan menjadi Rp2.059 triliun. Ini menandakan bahwa pada tahun tersebut, realisasi pengeluaran melebihi yang dianggarkan. Anggaran awal TA 2021 sebesar Rp2.249 triliun, realisasi pengeluaran kembali mengalami penurunan, yaitu Rp1.978 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa tahun ini terjadi penurunan penggunaan anggaran dibandingkan dengan tahun 2020. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan fluktuasi dalam penggunaan anggaran selama TA 2017-2021, pada tahun 2020 mencatat realisasi pengeluaran tertinggi, sementara tahun 2021 mencatat realisasi terendah.

Secara umum, kedua tabel menunjukkan variasi antara anggaran dan realisasi baik untuk pendapatan maupun pengeluaran selama lima tahun. Tren ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan menghadapi tantangan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara efisien. Peningkatan

konsistensi antara anggaran dan realisasi serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ini akan membantu dalam membuat strategi yang lebih baik dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

B. Pembahasan

Pengukuran kinerja keuangan Pemda Kabupaten Pamekasan dari tahun 2017-2021 dengan konsep *Value For Money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

1. Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomi mengukur dengan melakukan perbandingan input berupa realisasi pengeluaran (belanja dan transfer) dengan anggaran pengeluaran. Rasio ini menunjukkan tingkat ekonomi pada suatu daerah. Semakin rendah realisasi pengeluaran dibandingkan anggaran pengeluaran maka rasio ekonomis semakin tinggi.

Menurut Maryanti & Munandar (2021) perhitungan kinerja dari aspek ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi: } \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Adapun kriteria ekonomis dan perhitungan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Kriteria Penilaian Ekonomis Kinerja Keuangan Daerah

Presentase Kriteria Keuangan	Kriteria
Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$)	Ekonomis
Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$)	Ekonomi Berimbang
Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$)	Tidak Ekonomis

Sumber: Mahsun (2019)

Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio ekonomis
Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017-2021:

**Tabel 4. 6 Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2017-2021**

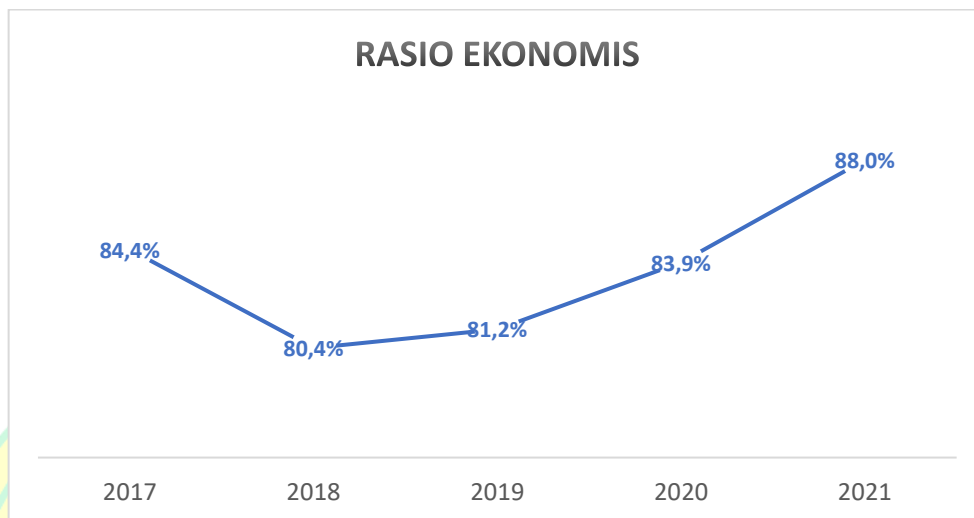
Tahun	Anggaran Pengeluaran (Dalam Rp)	Realisasi Pengeluaran (Dalam Rp)	% Ekonomis	Kriteria
2017	2.038.112.218.409	1.719.504.104.745,23	84,4%	Ekonomis
2018	2.138.127.562.564	1.719.319.711.299,32	80,4%	Ekonomis
2019	2.401.385.210.026	1.949.149.808.057,85	81,2%	Ekonomis
2020	2.455.712.187.951	2.059.118.220.818,57	83,9%	Ekonomis
2021	2.249.126.559.927	1.978.703.844.095,13	88,0%	Ekonomis

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Tabel 4.6 menggambarkan kondisi kinerja keuangan dengan rasio ekonomi.

Rasio ekonomis Kabupaten Pamekasan TA 2017-2021 memiliki kriteria “Ekonomis” dan persentase TA 2017-2021 mengalami fluktuatif. Pada rasio ekonomis realisasi pengeluaran jumlahnya lebih rendah dari yang dianggarkan maka masih terdapat dana pengeluaran yang menganggur (*idle cash*). Adapun alasan umum *idle cash* dapat terjadi antara lain: merealisasikan pengeluaran dengan tingkat kehati-hatian untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Peningkatan rasio ekonomi tersebut dapat mencerminkan penghematan anggaran untuk memperoleh realisasi pengeluaran yang serendah mungkin.

Gambar 4.1 merupakan grafik yang menggambarkan tingkat ekonomis di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2021.



Gambar 4. 1 Grafik Rasio Ekonomi Kab Pamekasan Tahun 2017-2021

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Setelah melakukan pengukuran rasio ekonomi pada tabel 4.2 untuk tahun 2017-2021, selanjutnya **menganalisis atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut**. Berikut analisis *value for money* dalam mengukur kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten Pamekasan tahun 2017-2021 dengan rasio ekonomi:

a. Tahun 2017

Rasio ekonomi pelaksanaan anggaran dan realisasi pengeluaran TA 2017 berupa belanja dan transfer di Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah 84,4% kondisi ini dikategorikan “Ekonomis” dalam pengelolaan anggaran dan realisasi pengeluaran.

Tabel 4. 7 Anggaran dan Realisasi Komponen Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017

Komponen Pengeluaran	Anggaran TA 2017		Realisasi TA 2017	
Belanja	Rp 1.778.468.675.988	87,26%	Rp 1.463.511.253.200	85,11%
Belanja Operasi	Rp 1.273.602.875.025	62,49%	Rp 1.088.706.942.368	63,32%
Belanja Modal	Rp 499.065.800.963	24,49%	Rp 372.031.422.732	21,64%
Belanja Tidak Terduga	Rp 5.800.000.000	0,28%	Rp 2.772.888.100	0,16%
Transfer	Rp 259.643.542.421	12,74%	Rp 255.992.851.546	14,89%
Jumlah Pengeluaran (Belanja dan Transfer)	Rp 2.038.112.218.409	100,00%	Rp 1.719.504.104.745	100,00%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Anggaran pengeluaran yang ditargetkan menunjukkan jumlah Rp2.038.112.218.409 dan realisasi sebesar Rp1.719.504.104.745. Terdapat beberapa komponen atas anggaran dan realisasi pengeluaran seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Setiap tahunnya, komponen anggaran dan realisasi pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar yaitu belanja operasi. Terdapat faktor-faktor atas jumlah persentase dari jumlah komponen pengeluaran, antara lain:

1) **Belanja Operasi**

Anggaran belanja operasi menunjukkan jumlah Rp1.273.602.875.025 dengan persentase 62,49% dan realisasi sebesar Rp1.088.706.942.368 dengan persentase 63,32% dari jumlah pengeluaran. Komponen belanja operasi kabupaten Pamekasan yang mana terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja pegawai memberikan pengeluaran terbesar dari jenis belanja operasi.

a) Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai menunjukkan jumlah Rp799.639.391.849,40 dan realisasi sebesar Rp705.931.702.073,90. Jumlah realisasi belanja pegawai belum terealisasi dengan baik yang mana jumlahnya lebih rendah dari yang dianggarkan. **Hal ini dikarenakan terdapat komponen belanja pegawai yang dianggarkan akan tetapi tidak direalisasikan** seperti, biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp24.237.000 dan uang lembur sebesar Rp3.461.715.500.

Belanja pegawai pada tahun anggaran 2017 di antaranya direalisasikan untuk: Belanja Pegawai pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp1.751.489.180, belanja Pegawai pada AKPER yang berasal dari penerimaan BLUD AKPER sebesar Rp1.401.806.526 jumlah tersebut hanya terdapat di tahun 2017, belanja Pegawai pada Puskesmas dari penerimaan Dana Kapitasi BPJS sebesar Rp21.550.000, dan realisasi belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP yang dikelola langsung sebesar Rp2.203.132.525. Termasuk dalam belanja Pegawai adalah Tunjangan PPh, Perhitungan Tunjangan PPh tersebut belum mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Apabila transaksi yang pengeluarannya tidak melalui Kas Umum Daerah maka transaksi tersebut tidak dapat langsung dilakukan pencatatan seperti Dana BOS dan Dana Kapitasi.

b) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2017 sebesar Rp385.718.897.975 dan jumlah realisasinya sebesar Rp305.094.291.492. Rincian belanja barang dan jasa kabupaten Pamekasan mencakup beberapa kategori, belanja bahan pakai habis, belanja bahan/ material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung /gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja lapangan, belanja pakaian khusus, belanja perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta belanja pemeliharaan dan jasa konsultasi. Besarnya pengeluaran **belanja barang dan jasa** direalisasikan untuk belanja jasa kantor dengan jumlah realisasi sebesar Rp129.461.401.464,97.

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017 sebesar Rp68,554,040,401,56 yang dikelompokkan atas **Pemerintah Pusat** dengan realisasi Belanja Hibah tertinggi untuk Pemilihan Bupati (PILBUP), **Badan/Lembaga/Organisasi Swasta** dengan Belanja Hibah tertinggi untuk Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (Disdik), **Kelompok/Anggota Masyarakat** dengan Belanja Hibah tertinggi untuk

Pondok Pesantren/Yayasan, dan Masyarakat/Pihak Ketiga. Realisasi belanja hibah tahun 2017 yang berasal dari reklasifikasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp20.099.821.711, diantaranya Rp2.306.457.500 merupakan barang yang diserahkan kepada masyarakat dan sebesar Rp17.793.363.711 berupa barang yang diserahkan kepada pihak ketiga.

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2017 menunjukkan jumlah Rp8.066.182.700 dan anggarannya sebesar Rp9.988.313.000. Tidak tercapainya realisasi dikarenakan anggaran Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp100.000.000, namun tidak terealisasi atau Rp0. Realisasi belanja bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga TA 2017 sebesar Rp422.682.700 merupakan bantuan sosial dari Dinas Sosial sebesar Rp337.182.700 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp85.500.000.

e) Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi dan anggaran belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017 sebesar Rp1.060.725.700,00 terdiri dari Pengeluaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2) Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017 menunjukkan jumlah Rp499.065.800.963 dengan persentase 24,49% dan

realisasi sebesar Rp372.031.422.731,73 dengan persentase 21,64% dari jumlah pengeluaran. Jumlah belanja modal tersebut terdiri dari: belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; serta aset tetap lainnya.

Realisasi Pengeluaran Modal pada TA 2017 di antaranya: Realisasi Belanja Modal pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp16.599.990.778, Realisasi Belanja Modal pada AKPER yang berasal dari penerimaan BLUD AKPER hanya terdapat di tahun 2017 sebesar Rp222.065.375. Realisasi Belanja Modal pada Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp11.566.792.516, Realisasi Belanja Modal pada Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp15.040.264.104,73.

3) Belanja Tak Terduga

Anggaran Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017 menunjukkan jumlah Rp5.800.000.000 dengan persentase 0,28% dan realisasinya sebesar Rp2.772.888.100 dengan persentase 0,16% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut direalisasikan untuk penanganan bencana alam dan terdapat Pengembalian Kelebihan Pendapatan Tidak Terduga untuk tahun 2015. Adapun bencana alam yang terjadi antara lain; bencana alam kekeringan dan rawan air bersih, bencana banjir, bencana tanah longsor, dan kebakaran. Jumlah realisasi terbesar di realisasikan untuk **penanganan bencana alam kekeringan dan rawan air bersih** dengan jumlah sebesar Rp646.759.250.

4) Transfer

Anggaran Transfer pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017 menunjukkan jumlah Rp259.643.542.421 dengan persentase 12,74% dan realisasi sebesar Rp255.992.851.545,50 dengan persentase 14,89% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa dari pemerintah pusat dan bantuan Keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota ke Desa). Tahun 2017 Desa Candi Burung Kecamatan Proppo belum menerima dana desa karena belum melengkapi dan mengajukan usulan pencairan dana desa ke Bupati Pamekasan. Hal ini karena Pemerintah Desa Candi Burung belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDes) Tahun 2017.

b. Tahun 2018

Pada tahun 2018, rasio ekonomi pelaksanaan anggaran dan realisasi pengeluaran berupa belanja dan transfer di Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah 80,4% kondisi ini dikategorikan “Ekonomis”.

Tabel 4. 8 Anggaran dan Realisasi Komponen Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018

Komponen Pengeluaran	Anggaran TA 2018		Realisasi TA 2018	
Belanja	Rp 1.876.057.427.136	87,74%	Rp 1.458.086.461.650	84,81%
Belanja Operasi	Rp 1.407.610.194.927	65,83%	Rp 1.137.378.297.494	66,15%
Belanja Modal	Rp 465.047.232.209	21,75%	Rp 317.340.696.506	18,46%
Belanja Tidak Terduga	Rp 3.400.000.000	0,16%	Rp 3.367.467.650	0,20%
Transfer	Rp 262.070.135.428	12,26%	Rp 261.233.249.649	15,19%
Jumlah Pengeluaran (Belanja dan Transfer)	Rp 2.138.127.562.564	100,00%	Rp 1.719.319.711.299	100,00%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Namun, rasio ekonomi mengalami penurunan signifikan sebesar 4% dari sebelumnya 84,4%. Hal ini terjadi karena pada TA 2018 Anggaran pengeluaran

menunjukkan jumlah Rp2.138.127.562.564 sementara realisasinya sebesar Rp1.719.319.711.299. Anggaran pengeluaran tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp2.038.112.218.409 dan realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, jumlah tahun sebelumnya sebesar Rp1.719.504.104.745,23. Komponen anggaran dan realisasi pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar setiap tahunnya yaitu belanja operasi.

1) Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi menunjukkan jumlah Rp1.407.610.194.927 dengan persentase 65,83% dan realisasinya sebesar Rp1.137.378.297.494,49 dengan persentase 66,15% dari jumlah pengeluaran. Anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017, jumlah anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp1.273.602.875.025 dan realisasi sebesar Rp1.088.706.942.368.

a) Belanja Pegawai

Komponen belanja pegawai memberikan kontribusi terbesar di setiap tahunnya. Anggaran belanja pegawai menunjukkan jumlah Rp820.260.297.418 dan realisasi sebesar Rp696.617.746.036,90. Jumlah realisasi belanja pegawai belum terealisasi dengan baik dikarenakan jumlahnya lebih rendah dari yang dianggarkan. **Hal ini dikarenakan terdapat komponen belanja pegawai yang dianggarkan akan tetapi tidak direalisasikan** seperti, biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp21.660.147. Selain itu komponen lainnya mengalami penurunan realisasi, kecuali Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota

DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, serta Honorarium Non PNS.

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2018 di antaranya: Realisasi belanja Pegawai pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo TA 2018 sebesar Rp2.057.532.302, realisasi belanja Pegawai pada Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi BPJS sebesar Rp68.300.000, dan realisasi belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP yang dikelola langsung sebesar Rp3.491.720.500. Termasuk dalam Pengeluaran Pegawai adalah Tunjangan PPh, Perhitungan Tunjangan PPh tersebut belum mengacu pada PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

b) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2018 sebesar Rp478.519.971.100 dan jumlah realisasinya sebesar Rp359.004.837.716. Belanja barang dan jasa dikontribusi oleh belanja jasa kantor. Pada tahun ini terdapat tambahan komponen Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Realisasi Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 sebesar Rp74.801.168.041,36 dikelompokkan atas Pemerintah Pusat yang mana realisasi Belanja Hibah tertinggi untuk PILBUP, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang mana Belanja Hibah tertinggi untuk Kegiatan KONI dan Bantuan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (Disdik)), Kelompok/Anggota Masyarakat yang mana Belanja Hibah tertinggi untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK), dan Masyarakat/Pihak Ketiga (Konversi Dari Belanja Barang dan Jasa).

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2018 sebesar Rp158.010.441,36 merupakan realisasi belanja hibah BLUD Akper pada Dinas Kesehatan yang pengelolaan sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan diserahkan ke Kementerian Riset dan DIKTI (dialihkan ke Poltera) tanpa melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2018 menunjukkan jumlah Rp5.893.820.000 dan anggarannya Rp22.492.796.509. Tidak tercapainya realisasi dikarenakan anggaran untuk kegiatan yayasan yatim piatu dan Belanja Bantuan Sosial untuk Kegiatan Yang Tidak Bisa Direncanakan (Dinsos) belum terealisasi 100%. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat hanya terealisasi sebesar Rp5.620.120.000, dari jumlah anggaran sebesar Rp22.092.796.509. Hal tersebut dikarenakan Belanja sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejumlah Rp14.444.576.509 tidak terealisasi atau Rp0.

e) **Belanja Bantuan Keuangan**

Realisasi dan anggaran belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 tidak terjadi peningkatan yaitu sebesar Rp1.060.725.700,00, terdiri dari Pengeluaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2) **Belanja Modal**

Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 menunjukkan jumlah Rp465.047.232.209 dengan persentase 21,75% dan realisasi sebesar Rp317.340.696.505,83 dengan persentase 18,46% dari jumlah pengeluaran. Realisasi Pengeluaran Modal pada tahun anggaran 2018 di antaranya: Realisasi Belanja Modal pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp10.403.420.262, Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp9.556.059.401,92, Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp13.221.669.797.

3) **Belanja Tidak Terduga**

Anggaran Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 menunjukkan jumlah Rp3.400.000.000 dengan persentase 0,16% dan realisasinya sebesar Rp3.367.467.650 dengan persentase 0,20% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut digunakan untuk penanganan bencana alam dan terdapat Pengembalian Kelebihan Pendapatan Tidak Terduga. Adapun bencana alam yang terjadi antara lain; bencana alam kekeringan dan rawan air bersih, bencana banjir, bencana tanah longsor, kebakaran.

4) Transfer

Anggaran Transfer pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 menunjukkan jumlah Rp254.719.838.600, dengan persentase 12,26% dan realisasi sebesar Rp254.719.033.700 dengan persentase 15,19% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Pemerintah Desa, dan Alokasi Dana Desa.

c. Tahun 2019

Pada tahun 2019, rasio ekonomi pelaksanaan anggaran dan realisasi pengeluaran berupa belanja dan transfer di Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah 81,2% kondisi ini dikategorikan “Ekonomis”.

Tabel 4. 9 Anggaran dan Realisasi Komponen Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019

Komponen Pengeluaran	Anggaran TA 2019		Realisasi TA 2019	
Belanja	Rp 2.047.415.007.096	85,26%	Rp 1.634.657.350.343	83,87%
Belanja Operasi	Rp 1.486.333.903.668	61,89%	Rp 1.230.921.916.217	63,15%
Belanja Modal	Rp 555.981.103.428	23,15%	Rp 399.606.369.876	20,50%
Belanja Tidak Terduga	Rp 5.100.000.000	0,21%	Rp 4.129.064.250	0,21%
Transfer	Rp 353.970.202.930	14,74%	Rp 314.492.457.715	16,13%
Jumlah Pengeluaran (Belanja dan Transfer)	Rp 2.401.385.210.026	100,00%	Rp 1.949.149.808.058	100,00%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Rasio ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,8% dari sebelumnya 80,4%. Hal ini terjadi karena pada TA 2019 Anggaran pengeluaran menunjukkan jumlah Rp2.401.385.210.026, sementara realisasinya sebesar Rp1.949.149.808.057,85. Anggaran dan realisasi pengeluaran tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018, jumlah tahun sebelumnya sebesar

Rp2.138.127.562.564 dan realisasinya sebesar Rp1.719.319.711.299. Komponen anggaran dan realisasi pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar setiap tahunnya yaitu belanja operasi.

1) Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi menunjukkan jumlah Rp1.486.333.903.668 dengan persentase 61,89% dan realisasinya sebesar Rp1.230.921.916.216,85 dengan persentase 63,15% dari jumlah pengeluaran. Anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018, jumlah anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp1.407.610.194.927 dan realisasinya sebesar Rp1.137.378.297.494,49.

a) Belanja Pegawai

Komponen belanja pegawai memberikan kontribusi terbesar di setiap tahunnya. Anggaran belanja pegawai menunjukkan jumlah Rp819.005.172.249 dan realisasi sebesar Rp696.775.967.923. Jumlah realisasi belanja pegawai belum terealisasi dengan baik dikarenakan jumlahnya lebih rendah dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan terdapat komponen belanja pegawai yang dianggarkan akan tetapi tidak direalisasikan seperti, biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp24.237.000. Selain itu komponen lainnya mengalami penurunan realisasi, kecuali Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, serta Belanja Pegawai BLUD.

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2019 di antaranya:
Realisasi belanja Pegawai pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD

RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo TA 2018 sebesar Rp2.453.392.050, realisasi belanja Pegawai pada Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi BPJS terdapat di tahun TA 2019 sebesar Rp29.817.500, dan realisasi belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP yang dikelola langsung sebesar Rp2.455.153.800.

b) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2019 sebesar Rp593.278.662.024 dan jumlah realisasinya sebesar Rp476.988.790.160,85. Belanja barang dan jasa dikontribusi oleh belanja jasa kantor. Pada tahun ini terdapat tambahan komponen berupa Belanja Sewa Alat Berat dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 sebesar Rp47.268.400.000 dikelompokkan atas Pemerintah Pusat yang mana realisasi Belanja Hibah tertinggi untuk Pengamanan Kepada POLRES, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang mana Belanja Hibah tertinggi untuk Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), Kelompok/Anggota Masyarakat yang mana Belanja Hibah tertinggi untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK).

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2019 menunjukkan jumlah Rp8.805.330.000 dan anggarannya Rp18.981.241.021. Bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat hanya terealisasi sebesar Rp8.409.730.000, dari jumlah anggaran sebesar Rp18.581.241.021. Hal tersebut dikarenakan Belanja sosial kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejumlah Rp9.776.421.021 tidak terealisasi atau Rp0.

e) Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi dan anggaran belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 sebesar Rp1.083.428.133, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat penambahan belanja bantuan kepada partai Perindo.

2) Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 menunjukkan jumlah Rp555.981.103.428 dengan persentase 23,15% dan realisasi sebesar Rp399.606.369.876 dengan persentase 20,50% dari jumlah pengeluaran. Realisasi Pengeluaran Modal pada tahun anggaran 2019 di antaranya: Realisasi Belanja Modal pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp9.657.090.090, Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp8.938.434.149, Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp13.224.406.375.

3) Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 menunjukkan jumlah Rp5.100.000.000 dan realisasinya sebesar Rp4.129.064.250 dengan persentase 0,21% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut digunakan untuk penanganan bencana alam. Adapun bencana alam yang terjadi antara lain; bencana alam kekeringan dan rawan air bersih, bencana banjir, bencana tanah longsor, dan kebakaran.

4) Transfer

Anggaran Transfer pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 menunjukkan jumlah Rp353.970.202.930 dengan persentase 14,74% dan realisasi sebesar Rp314.492.457.715 dengan persentase 16,13% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut diklasifikasikan menjadi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi serta Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya, Pemerintah Desa, dan Alokasi Dana Desa.

d. Tahun 2020

Pada tahun 2020, rasio ekonomi pelaksanaan anggaran dan realisasi pengeluaran berupa belanja dan transfer di Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah 83,9% kondisi ini dikategorikan “Ekonomis”.

Tabel 4. 10 Anggaran dan Realisasi Komponen Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020

Komponen Pengeluaran	Anggaran TA 2020		Realisasi TA 2020	
Belanja	Rp 2.139.405.190.525	87,12%	Rp 1.745.260.812.350	84,76%
Belanja Operasi	Rp 1.442.448.190.494	58,74%	Rp 1.239.889.477.520	60,21%
Belanja Modal	Rp 626.844.536.661	25,53%	Rp 462.851.108.600	22,48%
Belanja Tidak Terduga	Rp 70.112.463.370	2,86%	Rp 42.520.226.230	2,06%
Transfer	Rp 316.306.997.426	12,88%	Rp 313.857.408.468	15,24%
Jumlah Pengeluaran (Belanja dan Transfer)	Rp 2.455.712.187.951	100,00%	Rp 2.059.118.220.819	100,00%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Rasio ekonomi mengalami peningkatan sebesar 2,7% dari sebelumnya 81,2%. Hal ini terjadi karena pada TA 2020 Anggaran pengeluaran menunjukkan jumlah Rp2.455.712.187.951, sementara realisasinya sebesar Rp2.059.118.220.818,57. Anggaran dan realisasi pengeluaran tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, jumlah tahun sebelumnya sebesar Rp2.401.385.210.026 dan realisasinya sebesar Rp1.949.149.808.057,85.

Dalam tahun ini, komponen anggaran dan realisasi pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar yaitu belanja operasi.

1) Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi menunjukkan jumlah Rp1.442.448.190.494 dengan persentase 58,74% dan realisasinya sebesar Rp1.239.889.477.519,74 dengan persentase 60,21% dari jumlah pengeluaran. Anggaran belanja operasi tahun 2020 mengalami penurunan sedangkan realisasinya meningkat dari tahun 2019, jumlah anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp1.486.333.903.668 dan realisasinya sebesar Rp1.230.921.916.216,85.

a) Belanja Pegawai

Komponen belanja pegawai memberikan kontribusi terbesar di setiap tahunnya. Anggaran belanja pegawai menunjukkan jumlah Rp793.415.383.763,00 dan realisasi sebesar Rp674.614.637.282. Jumlah realisasi belanja pegawai belum terealisasi dengan baik dikarenakan jumlahnya lebih rendah dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan terdapat komponen belanja pegawai yang dianggarkan akan tetapi tidak direalisasikan seperti, biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp24.237.000. Selain itu komponen lainnya mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, kecuali Gaji dan Tunjangan, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Honorarium Non PNS, serta Belanja Pegawai BLUD. Pada TA 2020 Honorarium Non PNS, anggaran yang direncanakan lebih besar daripada realisasinya. Akan tetapi jumlah realisasinya mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, jumlah realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.864.465.000 lebih rendah dari tahun 2020 sebesar Rp14.998.025.820.

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2020 di antaranya: Realisasi belanja Pegawai pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp33.47.508.256, Realisasi Belanja Pegawai pada 10 Puskesmas yang sudah BLUD sebesar Rp17.600.000, realisasi belanja Pegawai pada Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi BPJS sebesar Rp28.197.500, dan realisasi

belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP yang dikelola langsung sebesar Rp13.598.210.820.

b) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2020 sebesar Rp577.651.206.413 dan jumlah realisasinya sebesar Rp501.042.090.318,74. Belanja barang dan jasa dikontribusi oleh belanja jasa kantor. Pada tahun ini jumlah realisasi atas barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya akan tetapi jumlah yang dianggarkan lebih tinggi dari nilai realisasinya.

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 sebesar Rp49.260.674.919 dikelompokkan atas Pemerintah Pusat namun tidak terealisasikan, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang mana Belanja Hibah tertinggi untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), Kelompok/Anggota Masyarakat yang mana Belanja Hibah tertinggi untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK). Pada tahun ini jumlah realisasi atas belanja hibah meningkat dari tahun sebelumnya akan tetapi jumlah yang dianggarkan lebih tinggi dari nilai realisasinya.

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2020 menunjukkan jumlah Rp14.972.075.000 dan anggarannya Rp17.155.411.300. Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan yayasan yatim piatu dan kegiatan yang tidak direncanakan (Dinsos), serta Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat dimanfaatkan untuk program pelajar dan mahasiswa tidak mampu dan Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

e) Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 sejumlah Rp0, karena di kelompokkan menjadi akun Beban Hibah Kepada Partai Politik.

2) Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 menunjukkan jumlah Rp626.844.536.661 dengan persentase 25,53% dan realisasi sebesar Rp462.851.108.600,38 dengan persentase 22,48% dari jumlah pengeluaran. Realisasi Pengeluaran Modal pada tahun anggaran 2020 di antaranya: Realisasi Belanja Modal pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar RpRp12.873.758.294, 10 Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana BLUD sebesar Rp2.431.304.168 serta 10 Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp2.681.662.405, dan Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp21.454.617.536.

3) Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 menunjukkan jumlah Rp70.112.463.370 dengan persentase 2,86% dan

realisasinya sebesar Rp42.520.226.230 dengan persentase 2,06% dari jumlah pengeluaran. Jumlah realisasi tersebut mengalami peningkatan signifikan yang disebabkan adanya penanganan dan pencegahan COVID-19 yang jumlah realisasinya Rp38.318.131.105. Untuk tahun 2020 dan 2021 terdapat rincian anggaran khusus BTT terkait penanganan COVID-19. Selain itu digunakan untuk penanganan bencana alam yang pada TA 2020 mengalami peningkatan realisasi, seperti bencana banjir dan kebakaran. Serta terdapat realisasi Pengembalian Kelebihan Pendapatan Tidak Terduga.

4) Transfer

Anggaran Transfer pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 menunjukkan jumlah Rp316.306.997.426, dengan persentase 12,88% dan realisasi sebesar Rp313.857.408.468,45 dengan persentase 15,24% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut diklasifikasikan menjadi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi serta Belanja Transfer Bantuan Keuangan merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, yang mencakup Dana Desa dari pemerintah pusat dan bantuan Keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota ke Desa.

e. Tahun 2021

Pada tahun 2021, rasio ekonomi pelaksanaan anggaran dan realisasi pengeluaran berupa belanja dan transfer di Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah 88% kondisi ini dikategorikan “Ekonomis”.

Tabel 4. 11 Anggaran dan Realisasi Komponen Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021

Komponen Pengeluaran	Anggaran TA 2021		Realisasi TA 2021	
Belanja	Rp 1.939.536.334.871	86,24%	Rp 1.677.957.238.099	84,80%
Belanja Operasi	Rp 1.550.057.811.967	68,92%	Rp 1.342.670.602.291	67,86%
Belanja Modal	Rp 372.896.550.597	16,58%	Rp 319.197.803.842	16,13%
Belanja Tidak Terduga	Rp 16.581.972.307	0,74%	Rp 16.088.831.966	0,81%
Transfer	Rp 309.590.225.056	13,76%	Rp 300.746.605.996	15,20%
Jumlah Pengeluaran (Belanja dan Transfer)	Rp 2.249.126.559.927	100,00%	Rp 1.978.703.844.095	100,00%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Rasio ekonomi mengalami peningkatan sebesar 4,1% dari sebelumnya 83,9%. Hal ini terjadi karena pada TA 2021 Anggaran pengeluaran menunjukkan jumlah Rp2.249.126.559.927, sementara realisasinya sebesar Rp1.978.703.844.095,13. Anggaran dan realisasi pengeluaran tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2020, jumlah anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp2.455.712.187.951 dan realisasinya sebesar Rp2.059.118.220.818,57. Dalam tahun ini, komponen anggaran dan realisasi pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar yaitu belanja operasi.

1) Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi menunjukkan jumlah Rp1.550.057.811.967 dengan persentase 68,92% dan realisasinya sebesar Rp1.342.670.602.291,39 dengan persentase 67,86% dari jumlah pengeluaran. Anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, jumlah anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp1.442.448.190.494 dan realisasinya sebesar Rp1.239.889.477.519,74.

a) Belanja Pegawai

Komponen belanja pegawai memberikan kontribusi terbesar di setiap tahunnya. Anggaran belanja pegawai menunjukkan jumlah RpRp737.236.274.808 dan realisasi sebesar Rp647.036.267.778. Jumlah realisasi belanja pegawai belum terealisasi dengan baik dikarenakan jumlahnya lebih rendah dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan terdapat komponen belanja pegawai yang dianggarkan akan tetapi tidak direalisasikan seperti, belanja tunjangan PPPK, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK, belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK, belanja TKG PNSD, belanja uang jasa pengabdian DPRD, dan belanja pegawai BOS.

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2021 di antaranya: Realisasi belanja Pegawai pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp83.495.000, dan 20 Puskesmas yang berasal dari penerimaan BLUD Rp297.930.000 berupa pengeluaran honorarium penanggungjawaban Pengelola keuangan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2021 sebesar Rp724.131.220.236 dan jumlah realisasinya sebesar Rp611.529.371.926,37. Belanja barang dan jasa dikontribusi oleh belanja jasa kantor. Pada tahun ini jumlah realisasi atas barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya akan tetapi jumlah yang

dianggarkan lebih tinggi dari nilai realisasinya. Realisasi belanja barang dan jasa pada TA 2021 di antaranya terdapat realisasi pada; RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp93.153.295.562, 20 Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana BLUD sebesar Rp39.178.762.270, puskesmas larangan badung yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp630.126.055, dan Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp45.188.126.296.

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021 sebesar Rp66.791.017.587 terdiri dari: Belanja Hibah Uang dan Barang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang memiliki surat keterangan terdaftar; Belanja Hibah Uang, Barang, dan Jasa Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan bersifat Sosial Kemasyarakatan; Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Partai Politik.

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2021 menunjukkan jumlah Rp17.313.945.000 dan anggarannya Rp17.563.950.000 yang terdiri dari: Belanja Bantuan Sosial Uang dan Barang yang Direncanakan kepada Individu serta Belanja

Bantuan Sosial Uang dan Barang yang Direncanakan kepada Organisasi sosial kemasyarakatan untuk kegiatan yang tidak direncanakan (Dinsos).

e) Belanja Bantuan Keuangan

Tidak terdapat anggaran maupun realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021 sejumlah Rp0, karena di kelompokkan menjadi akun Beban Hibah Kepada Partai Politik.

2) Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021 menunjukkan jumlah Rp372.896.550.597 dengan persentase 16,58% dari dan realisasi sebesar Rp319.197.803.841,74 dengan persentase 16,13% dari jumlah pengeluaran. Realisasi Pengeluaran Modal pada tahun anggaran 2021 di antaranya: Realisasi Belanja Modal pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp14.315.922.437, 20 Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana BLUD sebesar Rp5.040.614.945 serta Puskesmas Larangan Badung yang berasal dari Penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp100.329.000, dan Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp18.254.110.234,97.

3) Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021 menunjukkan jumlah Rp16.581.972.307 dengan persentase 0,74% dan realisasinya sebesar Rp16.088.831.966 dengan persentase 0,81% dari jumlah pengeluaran. Jumlah realisasi tersebut mengalami penurunan realisasi dari tahun

2020 terjadi penurunan jumlah realisasi penanganan dan pencegahan COVID-19 yang jumlah realisasinya TA 2020 dari Rp38.318.131.105 menjadi Rp11.226.050.193. Selain itu digunakan untuk penanganan bencana alam dan terdapat realisasi Pengembalian Kelebihan Pendapatan Tidak Terduga.

4) Transfer

Anggaran Transfer pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021 menunjukkan jumlah Rp309.590.225.056 dengan persentase 13,76% dan realisasi sebesar Rp300.746.605.996 dengan persentase 15,20% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut diklasifikasikan menjadi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi serta Belanja Transfer Bantuan Keuangan merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, yang mencakup Dana Desa dari pemerintah pusat dan bantuan Keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota ke Desa.

Anggaran dan realisasi dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan diarahkan terutama untuk keperluan operasional, sehingga pengeluaran untuk proyek-proyek modal kurang mendapatkan koordinasi yang baik jika dibandingkan dengan pengeluaran operasional. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah memberikan prioritas pada pengeluaran sehari-hari yang termasuk dalam pengeluaran operasional, seperti biaya pegawai, pembelian barang dan jasa, pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Sementara itu, alokasi anggaran untuk proyek-proyek modal di Kabupaten Pamekasan, baik dalam anggaran maupun realisasi, lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran operasional. Akibatnya, salah satu aspek pembangunan

daerah masih belum terpenuhi sepenuhnya. Meskipun demikian, pengeluaran di Kabupaten Pamekasan tidak mengalami pemborosan karena pengeluaran yang terealisasi lebih rendah daripada anggaran yang telah ditetapkan.

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi mengukur dengan melakukan perbandingan output keluaran yang telah dicapai berupa realisasi pengeluaran (belanja dan transfer) dengan input berupa realisasi pendapatan. Adapun perhitungan kinerja dari aspek efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi: } \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi Pengeluaran}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Presentase Kriteria Keuangan	Kriteria
Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$)	Tidak Efisien
Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$)	Efisien Berimbang
Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$)	Efisien

Sumber: Mahsun (2019)

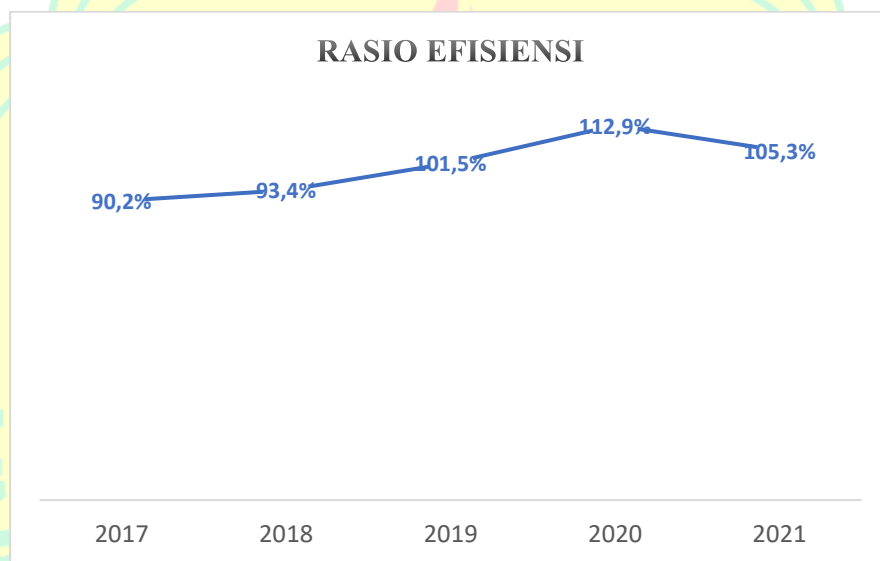
Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio efisiensi:

Tabel 4. 13 Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan (Dalam Rp)	Realisasi Pengeluaran (Dalam Rp)	% Efisiensi	Kriteria
2017	1.906.203.284.544,28	1.719.504.104.745,23	110,86%	Efisien
2018	1.841.101.038.915,09	1.719.319.711.299,32	107,08%	Efisien
2019	1.920.014.132.343,13	1.949.149.808.057,85	98,51%	Tidak Efisien
2020	1.824.167.916.966,71	2.059.118.220.818,57	88,59%	Tidak Efisien
2021	1.879.358.460.450,00	1.978.703.844.095,13	94,98%	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Tabel 4.13 menggambarkan hasil rasio efisiensi Kabupaten TA 2017 dan 2018 memiliki kriteria “Efisien” sementara pada tahun 2019-2021 memiliki kriteria “Tidak Efisien” untuk persentase masing-masing tahun 2017-2021 rata-rata persentasenya 100,003% dan mengalami fluktuatif. Untuk interpretasi perlu dilakukan pertimbangan faktor- faktor yang mempengaruhi rasio efisiensi.



Gambar 4. 2 Grafik Rasio Efisiensi

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Setelah melakukan pengukuran rasio efisiensi pada Gambar 4.2 untuk tahun 2017-2021, selanjutnya menganalisis atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Berikut analisis *value for money* dalam mengukur kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten Pamekasan tahun 2017-2021 dengan rasio efisiensi:

a. Tahun 2017

Pada tahun 2017 rasio efisiensi pelaksanaan realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran berupa belanja dan transfer di Pemerintah Kabupaten

Pamekasan adalah 110,86% yang artinya efisien dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran.

Tabel 4. 14 Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Kab Pamekasan TA 2017

Uraian	Realisasi TA 2017	
Jumlah Pendapatan	Rp 1.906.203.284.544	100,0%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 243.311.843.020	12,8%
Pendapatan Transfer	Rp 1.603.536.691.024	84,1%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 59.354.750.500	3,1%
Jumlah Pengeluaran	Rp 1.719.504.104.745	100%
Belanja	Rp 1.463.511.253.200	85,11%
Belanja Operasi	Rp 1.088.706.942.368	63,32%
Belanja Modal	Rp 372.031.422.732	21,64%
Belanja Tidak Terduga	Rp 2.772.888.100	0,16%
Transfer	Rp 255.992.851.546	14,89%
Surplus/(Defisit)	Rp 186.699.179.799	110,86%

Sumber: diolah penulis (2023)

Hal ini berarti Kinerja Pemerintah tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu pengeluaran yang terealisasi sebesar Rp1.719.504.104.745,23 yang terdiri dari belanja operasi (63,32%), belanja modal (21,64%), belanja tidak terduga (0,16%), dan transfer (14,89%). Komponen realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasi dengan persentase sebesar 63,32%.

1) **Belanja Operasi**

Belanja operasi pada tahun 2017 sebesar Rp1.088.706.942.368 dengan persentase sebesar 63,32% dari jumlah pengeluaran. Komponen belanja operasi yang memberikan kontribusi terbesar yaitu **belanja pegawai**, jumlah realisasinya sebesar Rp705.931.702.073,90. Adapun realisasi belanja pegawai pada TA 2017 seperti: Realisasi belanja Pegawai pada RSUD yang

berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo TA 2017 sebesar Rp1.751.489.180, realisasi belanja Pegawai pada AKPER yang berasal dari penerimaan BLUD AKPER hanya terdapat di tahun 2017 sebesar Rp1.401.806.526,00, realisasi belanja Pegawai pada Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi BPJS terdapat di tahun TA 2017 sebesar Rp21.550.000, dan realisasi belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP yang dikelola langsung sebesar Rp2.203.132.525.

Realisasi **belanja barang dan jasa** pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2017 sebesar Rp305.094.291.492 dan dikontribusi oleh belanja jasa kantor. **Realisasi belanja hibah** sebesar Rp68,554,040,401,56 dikelompokkan atas Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Kelompok/Anggota Masyarakat, dan Masyarakat/Pihak Ketiga. Realisasi belanja hibah yang berasal dari reklasifikasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp20.099.821.711 di antaranya, Rp2.306.457.500,00 merupakan barang yang diserahkan kepada masyarakat dan sebesar Rp17.793.363.711,00 berupa barang yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Realisasi **belanja bantuan sosial** pada Kabupaten Pamekasan pada TA 2017 menunjukkan jumlah Rp8.066.182.700. Salah satu komponen yang tidak direalisasikan yaitu Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Realisasi pengeluaran bantuan sosial yang berasal dari reklasifikasi pengeluaran barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak

ketiga merupakan bantuan sosial dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Realisasi **belanja bantuan keuangan** pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017 sebesar Rp1.060.725.700,00, direalisasikan kepada Partai Politik.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal menunjukkan jumlah Rp372.031.422.731,73 dengan persentase 21,64% dari jumlah pengeluaran. Realisasi tersebut di antaranya: Realisasi Belanja Modal pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo TA 2017 sebesar Rp16.599.990.778, Realisasi Belanja Modal pada AKPER yang berasal dari penerimaan BLUD AKPER hanya terdapat di tahun 2017 sebesar Rp222.065.375. Realisasi Belanja Modal pada Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp11.566.792.516, Realisasi Belanja Modal pada Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp15.040.264.104,73.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017 menunjukkan jumlah Rp2.772.888.100 dengan persentase 0,16% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut digunakan untuk penanganan bencana alam dan Pengembalian Kelebihan Pendapatan Tidak Terduga.

4) Transfer

Realisasi Transfer menunjukkan jumlah Rp255.992.851.545,50 dengan persentase sebesar 14,89% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut terdiri

dari Transfer/Bagi Hasil Ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa dari pemerintah pusat dan bantuan Keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota ke Desa).

Jumlah realisasi pendapatan yang diterima sebesar Rp1.906.203.284.544,28 terdiri dari **pendapatan asli daerah (12,8%), pendapatan transfer (84,1%), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (3,1%)**. Dari komponen realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling besar yaitu pendapatan transfer sebesar Rp1.603.536.691.024 dengan persentase 84,1%.

5) Pendapatan Asli Daerah

Jumlah realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp243.311.843.020,28 yang dikontribusi oleh unsur lain-lain PAD yang sah dengan realisasi sebesar Rp190.940.452.583,36. Jumlah tersebut didominasi oleh komponen pendapatan BLUD, Dana kapitasi JKN, dan Dana Bos. Komponen kedua yang berkontribusi yaitu pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp35.053.956.091 serta yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu pajak penerangan jalan, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB. Komponen ketiga yang berkontribusi yaitu retribusi daerah dengan realisasi sebesar Rp15.448.484.968, jumlah tersebut terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Komponen keempat yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan jumlah realisasi sebesar Rp1.868.949.377,92 jumlah tersebut terdiri dari Bagian Laba Bank Jatim dan Bagian Laba UMKM Jatim.

6) Pendapatan Transfer

Komponen pendapatan transfer merupakan komponen yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada pendapatan yaitu sebesar Rp1.603.536.691.024. Komponen pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat – dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi. Jumlah realisasi transfer pemerintah pusat- dana perimbangan memberikan kontribusi lebih besar Rp1.337.421.843.722 yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Realisasi Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017 sebesar Rp847.776.564.000. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya sebesar Rp161.483.324.376. Jumlah tersebut terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan dikontribusi oleh Dana Desa. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp104.631.522.926. Komponen bagi hasil pajak yang memiliki realisasi tertinggi yaitu pajak rokok.

7) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp59.354.750.500 terdiri atas pendapatan hibah dan bantuan keuangan provinsi. **Bantuan keuangan provinsi memberikan kontribusi lebih besar** dengan realisasi sebesar Rp53.985.600.000. Komponen berupa Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan dalam bantuan keuangan provinsi merupakan komponen yang memiliki realisasi tertinggi. Selain itu pada tahun ini bantuan keuangan

provinsi direalisasikan untuk program Terpadu TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) dan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur. **Realisasi Pendapatan Hibah** sebesar Rp5.369.150.500,00 merupakan penerusan dana hibah PDAM dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.500.000.000 dan Hibah untuk Program PKP-SPM (pengembangan Kapasitas Penerapan- Standar Pelayanan Minimal) sebesar Rp1.429.025.500. serta Hibah Program WISMP (*Water Resources and irrigation Sector Management Program*) sebesar Rp2.440.125.000.

b. Tahun 2018

Pada tahun 2018 rasio efisiensi pelaksanaan realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran berupa belanja dan transfer di Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah 107,08% yang artinya “Efisien” dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Persentase tersebut mengalami penurunan sebanyak 3,77% dari tahun 2017 yang persentasenya sebesar 110,86%.

Tabel 4. 15 Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Kab Pamekasan TA 2018

Uraian	Realisasi TA 2018	
Jumlah Pendapatan	Rp 1.841.101.038.915	100,0%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 222.410.664.049	12,1%
Pendapatan Transfer	Rp 1.542.898.734.866	83,8%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 75.791.640.000	4,1%
Jumlah Pengeluaran	Rp 1.719.319.711.299	100%
Belanja	Rp 1.458.086.461.650	84,81%
Belanja Operasi	Rp 1.137.378.297.494	66,15%
Belanja Modal	Rp 317.340.696.506	18,46%
Belanja Tidak Terduga	Rp 3.367.467.650	0,20%
Transfer	Rp 261.233.249.649	15,19%
Surplus/(Defisit)	Rp 121.781.327.616	107,08%

Sumber: diolah penulis (2023)

Hal ini berarti Kinerja Pemerintah tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu pengeluaran yang terealisasi sebesar Rp1.719.319.711.299,32 yang terdiri dari belanja operasi (66,15%), belanja modal (18,46%), belanja tidak terduga (0,20%), dan transfer (15,19%).

1) **Belanja Operasi**

Komponen realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasi sebesar Rp1.137.378.297.494,49 dengan persentase sebesar 66,15% dari jumlah pengeluaran. Komponen belanja operasi kabupaten Pamekasan TA 2018 yang memberikan kontribusi terbesar yaitu belanja pegawai, jumlah realisasinya sebesar Rp696.617.746.036,90. Adapun rincian atas **realisasi belanja pegawai** pada TA 2018 seperti: Realisasi belanja Pegawai pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo TA 2018 sebesar Rp2.057.532.302, realisasi belanja Pegawai pada Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi BPJS sebesar Rp68.300.000, dan realisasi belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP yang dikelola langsung sebesar Rp3.491.720.500.

Realisasi **belanja Barang dan Jasa** sebesar Rp359.004.837.716 dan dikontribusi oleh belanja jasa kantor. Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp74.801.168.041,36. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2018 sebesar Rp158.010.441,36 merupakan realisasi belanja hibah BLUD Akper pada Dinas Kesehatan yang pengelolaan

sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan diserahkan ke Kementerian Riset dan DIKTI (dialihkan ke Poltera).

Realisasi **belanja Bantuan Sosial** pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2018 menunjukkan jumlah Rp5.893.820.000. Tidak tercapainya realisasi dikarenakan kegiatan yayasan yatim piatu dan Belanja Bantuan Sosial untuk Kegiatan yang Tidak Bisa Direncanakan (Dinsos) belum terealisasi 100%. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat hanya terealisasi sebesar Rp5.620.120.000, belanja sosial yang direncanakan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejumlah Rp14.444.576.509 tidak terealisasi atau Rp0. **Realisasi Bantuan Keuangan** kepada Partai Politik tidak terjadi peningkatan yaitu sebesar Rp1.060.725.700.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal menunjukkan jumlah Rp317.340.696.505,83 dengan persentase sebesar 18,46% dari jumlah pengeluaran. Realisasi tersebut di antaranya: Realisasi Belanja Modal pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp10.403.420.262, Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp9.556.059.401,92, Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp13.221.669.797.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 menunjukkan jumlah Rp3.367.467.650 dengan persentase sebesar

0,20% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut digunakan untuk penanganan bencana alam dan terdapat Pengembalian Kelebihan Pendapatan Tidak Terduga. Adapun bencana alam yang terjadi antara lain; bencana alam kekeringan dan rawan air bersih, bencana banjir, bencana tanah longsor, kebakaran.

4) Transfer

Realisasi Transfer menunjukkan jumlah Rp254.719.033.700. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Pemerintah Desa, dan Alokasi Dana Desa.

Jumlah realisasi pendapatan yang diterima sebesar Rp1.841.101.038.915,09 yang terdiri dari **pendapatan asli daerah (12,1%), pendapatan transfer (83,8%), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (4,1%)**. Dari komponen realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling besar yaitu pendapatan transfer sebesar Rp1.542.898.734.866 dengan persentase sebesar 83,8% dari jumlah pendapatan.

5) Pendapatan Asli Daerah

Jumlah realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp222.410.664.049 dengan persentase sebesar 12,1% dari jumlah pendapatan. Komponen ini dikontribusi oleh unsur lain-lain PAD yang sah dengan realisasi sebesar Rp167.816.380.314. Jumlah tersebut didominasi oleh komponen pendapatan BLUD dan Dana kapitasi JKN. Komponen kedua yang berkontribusi yaitu pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp36.520.160.896 serta yang

memberikan kontribusi tertinggi dan mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu pajak penerangan jalan, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB.

Komponen ketiga yang berkontribusi yaitu retribusi daerah dengan realisasi sebesar Rp16.150.680.713,88, jumlah tersebut terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2017 karena meningkatnya retribusi jasa umum, menurunnya retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Komponen keempat yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan jumlah realisasi sebesar Rp1.923.442.124 jumlah tersebut terdiri dari Bagian Laba Bank Jatim dan Bagian Laba UMKM Jatim.

6) Pendapatan Transfer

Komponen pendapatan transfer merupakan komponen yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada pendapatan yaitu sebesar Rp1.542.898.734.866 dengan persentase sebesar 83,8% dari jumlah pendapatan. Akan tetapi jumlah realisasi pendapatan transfer TA 2018 menurun sebesar Rp60.637.956.158 atau -3,8% dari tahun 2017. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih besar yaitu transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebesar Rp1.252.406.756.553 yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Komponen bagi hasil pajak pada tahun 2017 tidak terdapat Pajak Penghasilan 21 sedangkan TA 2018 terdapat realisasinya sebesar Rp13.716.309.159. Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp849.764.469.000. Terjadi penurunan jumlah realisasi dana alokasi khusus di tahun 2018 dan tidak tercapainya Dana Alokasi Khusus.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya sebesar Rp187.764.284.400. Jumlah tersebut terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan dikontribusi oleh Dana Desa. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp102.727.693.913. Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan komponen bagi hasil pajak berupa pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan pajak rokok.

7) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp75.791.640.000 dengan persentase sebesar 4,1% dari jumlah pendapatan. Komponen ini terdiri atas pendapatan hibah dan bantuan keuangan provinsi. Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp54.083.440,00 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat seperti Hibah Dana Bos SD sebesar Rp42.697.440.000 dan Hibah Dana BOS SMP sebesar Rp10.297.000.000. Realisasi dan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp21.708.200.000,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari TA 2018 yang disebabkan realisasi Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) mengalami penurunan signifikan dengan jumlah Rp6.000.000.000 dari tahun 2017 sebesar Rp40.000.000.000. Terdapat dua program pada bantuan keuangan provinsi yang terdiri atas Program Terpadu TMMD (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman) dan BOP program Jalin Matra (Jalan Menuju Mandiri dan Sejahtera) (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

c. Tahun 2019

Pada tahun 2019 rasio efisiensi pelaksanaan realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran berupa belanja dan transfer di Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah 98,51% yang artinya "Tidak Efisien" dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Persentase tersebut mengalami penurunan sebanyak 9,92% dari tahun 2018 yang persentasenya sebesar 98,51%.

Tabel 4. 16 Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Kab Pamekasan TA 2019

Uraian	Realisasi TA 2019	
Jumlah Pendapatan	Rp 1.920.014.132.343	100,0%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 219.671.437.717	11,4%
Pendapatan Transfer	Rp 1.629.757.515.626	84,9%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 70.585.179.000	3,7%
Jumlah Pengeluaran	Rp 1.949.149.808.058	100%
Belanja	Rp 1.634.657.350.343	83,87%
Belanja Operasi	Rp 1.230.921.916.217	63,15%
Belanja Modal	Rp 399.606.369.876	20,50%
Belanja Tidak Terduga	Rp 4.129.064.250	0,21%
Transfer	Rp 314.492.457.715	16,13%
Surplus/(Defisit)	-Rp 29.135.675.715	98,51%

Sumber: diolah penulis (2023)

Hal ini berarti Kinerja Pemerintah tahun 2019 menunjukkan kinerja yang tidak baik, yaitu pengeluaran yang terealisasi sebesar Rp1.949.149.808.057,85 yang terdiri dari belanja operasi (63,15%), belanja modal (20,50%), belanja tidak terduga (0,21%), dan transfer (16,13%). Sedangkan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp1.920.014.132.343 sehingga terjadi defisit.

1) Belanja Operasi

Komponen realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasi sebesar Rp1.230.921.916.216,85 dengan persentase

sebesar 63,15% dari jumlah pengeluaran. Komponen pengeluaran operasi kabupaten Pamekasan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu belanja pegawai, jumlah realisasinya sebesar Rp696.775.967.923. Adapun rincian atas realisasi belanja pegawai pada TA 2019 seperti: Realisasi belanja Pegawai pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo TA 2018 sebesar Rp2.453.392.050, realisasi belanja Pegawai pada Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi BPJS terdapat di tahun TA 2019 sebesar Rp29.817.500, dan realisasi belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP yang dikelola langsung sebesar Rp2.455.153.800.

Realisasi belanja barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2019 sebesar Rp476.988.790.160,85. Jumlah tersebut dikontribusi oleh belanja jasa kantor serta pada tahun ini terdapat tambahan komponen berupa Belanja Sewa Alat Berat dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp47.268.400.000 di kelompokan atas Pemerintah Pusat realisasi tertinggi untuk Pengamanan Kepada POLRES, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta realisasi tertinggi untuk Belanja Hibah BPPDGS, Kelompok/Anggota Masyarakat realisasi tertinggi untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK).

Realisasi belanja Bantuan Sosial menunjukkan jumlah Rp8.805.330.000. Bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat terealisasi sebesar Rp8.409.730.000. Hal tersebut dikarenakan Belanja sosial kepada BPJS Kesehatan sejumlah Rp9.776.421.021 tidak terealisasi atau Rp0. Realisasi Bantuan Keuangan

sebesar Rp1.083.428.133, jumlah tersebut mengalami peningkatan dikarenakan terdapat penambahan belanja bantuan kepada partai Perindo.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 menunjukkan jumlah Rp399.606.369.876 dengan persentase sebesar 20,50% dari jumlah pengeluaran. Realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2019 di antaranya: Realisasi Belanja Modal pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp9.657.090.090, Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp8.938.434.149, Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp13.224.406.375

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga menunjukkan jumlah sebesar Rp4.129.064.250 dengan persentase sebesar 0,21% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut digunakan untuk penanganan bencana alam. Adapun bencana alam yang terjadi antara lain; bencana alam kekeringan dan rawan air bersih, bencana banjir, bencana tanah longsor, kebakaran.

4) Transfer

Realisasi Transfer menunjukkan jumlah Rp314.492.457.715 dengan persentase sebesar 16,13% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut diklasifikasikan menjadi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi serta Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari Belanja

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya, Pemerintah Desa, dan Alokasi Dana Desa.

Jumlah realisasi pendapatan yang diterima sebesar Rp1.920.014.132.343 yang terdiri dari **pendapatan asli daerah (11,4%), pendapatan transfer (84,9%), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (3,7%)**. Dari komponen realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling besar yaitu pendapatan transfer sebesar Rp1.629.757.515.626.

5) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp219.671.437.717 dengan persentase sebesar 11,4% dari jumlah pendapatan. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp222.410.664.049. Lain-lain PAD yang sah merupakan komponen yang jumlah realisasinya tertinggi sebesar Rp155.688.839.988. Jumlah tersebut didominasi oleh komponen pendapatan BLUD dan Dana kapitasi JKN.

Komponen kedua yang berkontribusi yaitu pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp44.204.121.424 hal tersebut terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2018 serta yang memberikan kontribusi tertinggi seperti pajak penerangan jalan, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB. Komponen ketiga yang berkontribusi yaitu retribusi daerah dengan jumlah realisasi sebesar Rp17.762.125.858, jumlah tersebut terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2018 karena meningkatnya retribusi jasa umum, menurunnya retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Komponen

keempat yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan jumlah realisasi sebesar Rp2.016.350.446.

6) Pendapatan Transfer

Komponen pendapatan transfer merupakan komponen yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada pendapatan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp1.629.757.515.626 dengan persentase sebesar 84,9% dari jumlah pendapatan. Akan tetapi jumlah realisasi pendapatan transfer TA 2019 meningkat sebesar Rp86.858.780.760 atau 5,6% dari tahun 2018. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih besar yaitu transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebesar Rp1.297.089.273.637 serta jumlah realisasinya meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp58.280.833.363.

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp892.340.709.000. Terjadi peningkatan jumlah realisasi dana alokasi khusus di tahun 2018 dan tidak tercapainya Dana Alokasi Khusus. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya sebesar Rp213.056.448.000. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan dikontribusi oleh Dana Desa. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp119.611.793.989. Semua komponen bagi hasil pajak provinsi mengalami peningkatan dengan pengecualian bagi hasil dari pajak rokok yang meningkat.

7) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp70.585.179.000 dengan persentase sebesar 3,7% dari jumlah pendapatan yang di kelompokkan atas

pendapatan hibah dan bantuan keuangan provinsi. Realisasi Pendapatan Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 sebesar Rp58.113.040.000, merupakan pendapatan hibah dari hibah dana bos, hibah dana bos kinerja dan hibah dana bos afirmasi. Realisasi Pendapatan Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 sebesar Rp12.472.139.000, merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi. Terdapat program bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yaitu program lanjutan dari tahun sebelumnya yaitu BOP program Jalin Matra (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

d. Tahun 2020

Pada tahun 2020 rasio efisiensi pelaksanaan realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran berupa belanja dan transfer di Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah 88,59% yang artinya "Tidak Efisien" dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Persentase tersebut mengalami penurunan sebanyak 9,92%% dari tahun 2019 yang persentasenya sebesar 98,51%.

Tabel 4. 17 Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Kab Pamekasan TA 2020

Uraian	Realisasi TA 2020	
Pendapatan	Rp 1.824.167.916.967	100,0%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 232.262.477.005	12,7%
Pendapatan Transfer	Rp 1.522.615.925.862	83,5%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 69.289.514.100	3,8%
Jumlah Pengeluaran	Rp 2.059.118.220.819	100%
Belanja	Rp 1.745.260.812.350	84,76%
Belanja Operasi	Rp 1.239.889.477.520	60,21%
Belanja Modal	Rp 462.851.108.600	22,48%
Belanja Tidak Terduga	Rp 42.520.226.230	2,06%
Transfer	Rp 313.857.408.468	88,59%
Surplus/(Defisit)	-Rp 234.950.303.852	112,9%

Sumber: diolah penulis (2023)

Hal ini berarti Kinerja Pemerintah tahun 2020 menunjukkan kinerja yang tidak baik, yaitu pengeluaran yang terealisasi sebesar Rp2.059.118.220.815,57 yang terdiri dari belanja operasi (60,21%), belanja modal (22,48%), belanja tidak terduga (2,06%), dan transfer (15,24%), sedangkan realisasi pendapatan yang diterima sebesar Rp1.824.167.916.966 sehingga mengalami defisit.

1) Belanja Operasi

Komponen realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling besar yaitu belanja operasi sebesar Rp1.239.889.477.519,74 dengan persentase sebesar 60,21% dari jumlah pengeluaran. Komponen pengeluaran operasi kabupaten Pamekasan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu belanja pegawai, jumlah realisasinya sebesar Rp674.614.637.282. Adapun rincian atas realisasi belanja pegawai pada TA 2020 seperti: Realisasi belanja Pegawai yang penerimaannya berasal dari BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp33.47.508.256, Realisasi Belanja Pegawai pada 10 Puskesmas BLUD sebesar Rp17.600.000, realisasi belanja Pegawai pada Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi BPJS sebesar Rp28.197.500, dan realisasi belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP yang dikelola langsung sebesar Rp13.598.210.820.

Realisasi belanja barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2020 sebesar Rp501.042.090.318,74. Jumlah tersebut dikontribusi oleh belanja jasa kantor. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp49.260.674.919 dikelompokkan atas Pemerintah Pusat namun tidak

terrealisasikan, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang direalisasikan untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), Kelompok/Anggota Masyarakat yang direalisasikan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK). Pada tahun ini jumlah realisasi atas belanja hibah meningkat dari tahun sebelumnya.

Realisasi belanja Bantuan Sosial menunjukkan jumlah Rp14.972.075.000. Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan yayasan yatim piatu dan kegiatan yang tidak direncanakan (Dinsos), serta Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat dimanfaatkan untuk program pelajar dan mahasiswa tidak mampu dan Kegiatan PMKS. Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp0, karena di kelompokkan menjadi akun Beban Hibah Kepada Partai Politik.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal menunjukkan jumlah Rp462.851.108.600,38 dengan persentase sebesar 22,48% dari jumlah pengeluaran.. Realisasi tersebut di antaranya: Realisasi Pengeluaran Modal pada tahun anggaran 2020 di antaranya: Realisasi Belanja Modal pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar RpRp12.873.758.294, 10 Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana BLUD sebesar Rp2.431.304.168 serta 10 Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp2.681.662.405, dan Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp21.454.617.536.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga menunjukkan jumlah sebesar Rp42.520.226.230 dengan persentase sebesar 2,06% dari jumlah pengeluaran. Jumlah realisasi tersebut mengalami peningkatan signifikan yang disebabkan adanya penanganan dan pencegahan COVID-19 yang jumlah realisasinya Rp38.318.131.105. Untuk tahun 2020 dan 2021 terdapat rincian anggaran khusus BTT terkait penanganan COVID-19. Selain itu digunakan untuk penanganan bencana alam yang pada TA 2020 mengalami peningkatan realisasi, seperti bencana banjir dan kebakaran. Serta terdapat realisasi Pengembalian Kelebihan Pendapatan Tidak Terduga.

4) Transfer

Realisasi Transfer menunjukkan jumlah Rp313.857.408.468,45 dengan persentase sebesar 15,24% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut diklasifikasikan menjadi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi serta Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, yang mencakup Dana Desa dari pemerintah pusat dan bantuan Keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota ke Desa.

Jumlah realisasi pendapatan yang diterima sebesar Rp1.824.167.916.966 yang terdiri dari **pendapatan asli daerah (12,7%), pendapatan transfer (83,5%), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (3,8%)**. Dari komponen realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling besar yaitu pendapatan transfer sebesar Rp1.522.615.925.862 dengan persentase sebesar 83,5% dari jumlah pendapatan.

5) Pendapatan Asli Daerah

Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp219.671.437.717 naik menjadi sebesar Rp232.262.477.005 dengan persentase sebesar 12,7% pada tahun 2020 atau terjadi kenaikan sebesar Rp12.591.039.287,58 atau naik sebesar 5,73% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut karena Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami kenaikan. Sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi daerah tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Lain-lain PAD yang sah merupakan komponen yang jumlah realisasinya tertinggi sebesar Rp176.499.561.830. Jumlah tersebut didominasi oleh komponen pendapatan BLUD dan Dana kapitasi JKN serta Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pendapatan dari Pengembalian.

Komponen kedua yang berkontribusi yaitu pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp37.192.592.664, hal tersebut terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2019 serta yang memberikan kontribusi tertinggi seperti yaitu pajak reklame, Pajak Parkir, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Komponen ketiga yang berkontribusi yaitu retribusi daerah dengan jumlah realisasi sebesar Rp16.517.650.380, jumlah tersebut terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2019 yang nominalnya sebesar Rp17.762.125.858 karena menurunnya retribusi jasa umum, retribusi jasa

usaha, dan terjadi peningkatan pada retribusi perizinan tertentu. Komponen keempat yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan jumlah realisasi sebesar Rp2.052.672.129 yang diakui dari Bagian Laba Bank Jatim dan UMKM (BPR) Jatim atas penyertaan modal.

6) Pendapatan Transfer

Komponen pendapatan transfer merupakan komponen yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada pendapatan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp1.522.615.925.862 dengan persentase sebesar 83,5% dari jumlah pendapatan. Jumlah realisasi pendapatan transfer TA 2020 menurun sebesar Rp107.141.589.764 atau -6,6% dari tahun 2019. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih besar setiap tahunnya yaitu transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebesar Rp1.216.610.793.470 serta jumlah realisasinya menurun dari tahun 2019 sebesar Rp118.439.749.679.

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp800.743.381.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten Pamekasan TA 2020 sebesar Rp259.560.355.000, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Reguler dan DAK Non Fisik. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya sebesar Rp243.080.838.800. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2019 yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan didominasi oleh Dana Desa. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp100.885.563.104. Semua komponen bagi hasil pajak provinsi mengalami penurunan.

7) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp69.289.514.100 dengan persentase sebesar 3,8% dari jumlah pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan bantuan keuangan provinsi. Realisasi Pendapatan Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 sebesar Rp56.797.547.100, merupakan pendapatan hibah dari Hibah Dana BOS SD dan SMP. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp1.500.000.000 yang tidak direalisasikan. Realisasi Pendapatan Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 sebesar Rp12.491.967.000 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi yang didominasi oleh Bantuan Keuangan Madin dan Guru Swasta (BPPDGS) (Dinas Pendidikan). Terdapat program bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yaitu Program Terpadu TMMD ke 107 Tahun 2020 dan Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) *outcome* meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas.

e. Tahun 2021

Pada tahun 2021 rasio efisiensi pelaksanaan realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran berupa belanja dan transfer di Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah 94,98% yang artinya "Tidak Efisien" dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Persentase tersebut mengalami peningkatan sebanyak 6,39% dari tahun 2020 yang persentasenya sebesar 88,59%.

Tabel 4. 18 Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Kab Pamekasan TA 2021

Uraian	Realisasi TA 2021	
Jumlah Pendapatan	Rp 1.879.358.460.454	100,0%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 205.969.039.947	11,0%
Pendapatan Transfer	Rp 1.596.381.889.771	84,9%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 77.007.530.736	4,1%
Jumlah Pengeluaran	Rp 1.978.703.844.095	100,0%
 Belanja	Rp 1.677.957.238.099	84,8%
Belanja Operasi	Rp 1.342.670.602.291	67,9%
Belanja Modal	Rp 319.197.803.842	16,1%
Belanja Tidak Terduga	Rp 16.088.831.966	0,8%
 Transfer	Rp 300.746.605.996	15,2%
Surplus/(Defisit)	-Rp 99.345.383.641	94,98%

Sumber: diolah penulis (2023)

Hal ini berarti Kinerja Pemerintah tahun 2021 menunjukkan kinerja yang tidak baik, yaitu pengeluaran yang terealisasi sebesar Rp1.978.703.844.095,13 yang terdiri dari belanja operasi (67,86%), belanja modal (16,13%), belanja tidak terduga (0,81%), dan transfer (15,20%) sedangkan realisasi pendapatan yang diterima sebesar Rp1.879.358.460.450 sehingga mengalami defisit.

1) Belanja Operasi

Komponen realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasi sebesar Rp1.342.670.602.291,39 dengan persentase sebesar 67,86% dari jumlah pengeluaran. Komponen belanja operasi kabupaten Pamekasan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu belanja pegawai, jumlah realisasinya sebesar Rp647.036.267.778. Adapun rincian atas realisasi belanja pegawai pada TA 2021 seperti: Realisasi belanja Pegawai pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp83.495.000, dan 20 Puskesmas yang berasal

dari penerimaan BLUD Rp297.930.000 berupa pengeluaran honorarium penanggung jawaban Pengelola keuangan.

Realisasi belanja barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada TA 2021 sebesar Rp611.529.371.926,37. Realisasi belanja barang dan jasa pada TA 2021 di antaranya; RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp93.153.295.562, 20 Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana BLUD sebesar Rp39.178.762.270, puskesmas larangan badung yang berasal dari penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp630.126.055, dan Dinas Pendidikan yang berasal dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp45.188.126.296.

Realisasi Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021 sebesar Rp66.791.017.587 terdiri dari: Belanja Hibah Uang dan Barang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial dan surat keterangan terdaftar; Belanja Hibah Uang, Barang, dan Jasa Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan bersifat Sosial Masyarakat; Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Partai Politik. Realisasi belanja Bantuan Sosial menunjukkan jumlah Rp17.313.945.000. Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp0, karena di kelompokkan menjadi akun Beban Hibah Kepada Partai Politik.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal menunjukkan jumlah Rp319.197.803.841,74 dengan persentase sebesar 16,13% dari jumlah pengeluaran. Realisasi

tersebut di antaranya: Realisasi Belanja Modal pada RSUD yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebesar Rp14.315.922.437, 20 Puskesmas yang berasal dari penerimaan Dana BLUD sebesar Rp5.040.614.945 serta Puskesmas Larangan Badung dari Penerimaan Dana Kapitasi sebesar Rp100.329.000, dan Dinas Pendidikan dari penerimaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp18.254.110.234,97.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp16.088.831.966 dengan persentase sebesar 0,81% dari jumlah pengeluaran. Jumlah realisasi tersebut mengalami penurunan realisasi dari tahun 2020 terjadi penurunan jumlah realisasi penanganan dan pencegahan COVID-19 yang jumlah realisasinya TA 2020 dari Rp38.318.131.105 menjadi Rp11.226.050.193. Selain itu digunakan untuk penanganan bencana alam dan terdapat realisasi Pengembalian Kelebihan Pendapatan Tidak Terduga.

4) Transfer

Realisasi Transfer menunjukkan jumlah Rp300.746.605.996 dengan persentase sebesar 15,20% dari jumlah pengeluaran. Jumlah tersebut diklasifikasikan menjadi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi serta Belanja Transfer Bantuan Keuangan merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, yang mencakup Dana Desa dari pemerintah pusat dan bantuan Keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota ke Desa.

Jumlah realisasi pendapatan yang diterima sebesar Rp1.879.358.460.450 yang terdiri dari **pendapatan asli daerah (11%), pendapatan transfer (84,9%), dan**

lain-lain pendapatan daerah yang sah (4,1%). Dari komponen realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling besar yaitu pendapatan transfer sebesar Rp1.596.381.889.771.

5) Pendapatan Asli Daerah

Jumlah realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp205.969.039.947 dengan persentase sebesar 11% dari jumlah pendapatan, pada TA 2021 mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan TA 2020. Lain-lain PAD yang sah merupakan komponen yang jumlah realisasinya tertinggi sebesar Rp155.330.465.602 yang dikontribusi oleh komponen pendapatan BLUD.

Komponen kedua yang berkontribusi yaitu pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp38.503.953.058, hal tersebut terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2020. Komponen yang memberikan kontribusi tertinggi seperti pajak hotel, Pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak parkir. Komponen ketiga yang berkontribusi yaitu retribusi daerah dengan jumlah realisasi sebesar Rp10.053.688.754, jumlah tersebut terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2020 karena terjadi penurunan retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan terjadi peningkatan pada retribusi jasa usaha. Komponen keempat yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan jumlah realisasi sebesar Rp2.080.932.532.

6) Pendapatan Transfer

Komponen pendapatan transfer merupakan komponen yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada pendapatan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp1.596.381.889.771 dengan persentase sebesar 84,9% dari jumlah pendapatan.

Jumlah realisasi pendapatan transfer TA 2021 menurun sebesar Rp73.765.963.909 dari tahun 2020. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih besar setiap tahunnya yaitu transfer pemerintah pusat–dana perimbangan sebesar Rp1.278.534.508.133 serta jumlah realisasinya menurun dari tahun 2020.

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp791.549.034.000. Realisasi Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten Pamekasan TA 2020 sebesar Rp283.130.820.137, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Reguler sebesar dan DAK Non Fisik. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya sebesar Rp224.290.009.800. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan didominasi oleh Dana Desa. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp132.839.643.387 dan semua komponen bagi hasil pajak provinsi mengalami peningkatan.

7) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp77.007.530.736 dengan persentase sebesar 4,1% dari jumlah pendapatan. Komponen tersebut terdiri atas pendapatan lainnya berupa bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, Hibah Dana BOS, dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Realisasi Pendapatan Lainnya merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang didominasi oleh Bantuan Keuangan Madin dan Guru Swasta- Dinas Pendidikan. Terdapat program bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yaitu Program Terpadu TMMD dan Program

Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) *outcome* meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Yang Berkualitas.

Upaya perbaikan dan penyesuaian dalam realisasi pengeluaran dan realisasi pendapatan perlu dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

3. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas mengukur dengan melakukan perbandingan membandingkan *outcome* atau hasil yang dicapai (Realisasi Pendapatan) dengan *output* yang dihasilkan (Anggaran Pendapatan).

Menurut Muryanti & Munandar (2021) perhitungan kinerja dari aspek efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas: } \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektifitas untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Perbandingan Kriteria Penilaian Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

Sumber	Presentase Kriteria Keuangan	Kriteria
Mahsun (2019)	Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$)	Tidak Efektif
	Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$)	Efektivitas Berimbang
	Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$)	Efektif
Kepmendagri No. 47 (1999)	75% keatas	Sangat Efektif
	60%-75%	Efektif
	45%-60%	Cukup Efektif
	30%-45%	Kurang Efektif
	Kurang dari 30%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017-2021 dengan kriteria menurut Mahsun (2019):

Tabel 4. 20 Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan (Dalam Rp)	Anggaran Pendapatan (Dalam Rp)	% Efektivitas	Kriteria
2017	1.906.203.284.544,28	1.858.293.158.524	102,6%	Efektif
2018	1.841.101.038.915,09	1.761.281.131.744	104,5%	Efektif
2019	1.920.014.132.343,13	1.912.582.902.152	100,4%	Efektif
2020	1.824.167.916.966,71	1.843.304.975.337	99,0%	Tidak Efektif
2021	1.879.358.460.450,00	1.937.021.014.573	97,0%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017-2021 dengan kriteria menurut Kepmendagri No. 47 (1999):

Tabel 4.21 Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan (Dalam Rp)	Anggaran Pendapatan (Dalam Rp)	% Efektivitas	Kriteria
2017	1.906.203.284.544,28	1.858.293.158.524	102,6%	Sangat Efektif
2018	1.841.101.038.915,09	1.761.281.131.744	104,5%	Sangat Efektif
2019	1.920.014.132.343,13	1.912.582.902.152	100,4%	Sangat Efektif
2020	1.824.167.916.966,71	1.843.304.975.337	99,0%	Sangat Efektif
2021	1.879.358.460.450,00	1.937.021.014.573	97,0%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Tabel 4.20 dan tabel 4.21 menggambarkan kondisi kinerja keuangan dalam menilai konsep *value for money* dengan menggunakan rasio efektivitas. Pada tabel 4.20 merupakan hasil perhitungan rasio efektivitas menurut teori Mahsun (2019) Kabupaten Pamekasan TA 2017-2019 memiliki kriteria “Efektif” dikarenakan persentasenya pada periode tersebut melebihi 100%. Namun pada TA 2020-2021

rasio efektivitas memiliki kriteria “Tidak efektif” karena persentase pada periode tersebut kurang dari 100% dan sebagai akibat dari pengaruh pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pada TA 2020, persentase rasio mencapai 99%, dan pada TA 2021, persentasenya mencapai 97%. Faktor pandemi COVID-19 kemungkinan memainkan peran dalam penurunan efektivitas, namun perlu dicatat bahwa persentase TA 2020-2021 sangat mendekati 100% untuk mencapai kategori efektivitas berimbang.

Dalam teori Mahsun (2019) pengukuran efektivitas untuk mengukur suatu keuangan daerah terdapat keberpihakan berbentuk sebuah kecenderungan dalam menentang sesuatu atau diartikan menjadi “Bias”. Terdapat kriteria jika diperoleh nilai sama dengan 100% maka bersifat “Efektivitas Berimbang”, dalam pengelolaan keuangan daerah pendapatan yang direalisasikan tidak akan sama dengan pendapatan yang dianggarkan. Pada hasil rasio efektivitas tahun 2020-2021 mencapai 99% dan pada TA 2021 persentasenya mencapai 97% dengan kriteria “Tidak Efektif”. Hasil tersebut bertentangan dengan Tabel 4.21 menggambarkan kondisi kinerja keuangan dengan melakukan pengukuran kinerja konsep *value for money* dengan menggunakan rasio efektivitas menurut Kepmendagri No. 47 (1999).

Rasio efektivitas Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya untuk periode tahun anggaran 2017-2021 memiliki kriteria dengan “Sangat Efektif” untuk persentase masing-masing tahun 2017-2021 berada diangka 75% ke atas dan mengalami fluktuatif. Tahun 2017 nilai persentase efektivitas sebesar 102,6% lebih kecil dari nilai persentase tahun 2018 sebesar 104,5% sehingga mengalami peningkatan sebanyak 1,9%. Tahun 2019-2021 mengalami penurunan persentase

pengukuran kinerja efektivitas yang mana nilai persentase berturut-turut adalah 100,4%, 99%, dan 97%. Walaupun mengalami penurunan persentase berturut-turut akan tetapi kinerja keuangan dengan rasio efektivitas pada periode 2019-2020 dikategorikan “sangat efektif”. Untuk interpretasi perlu dilakukan pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi rasio efektivitas.

Gambar 4.3 merupakan grafik yang menggambarkan tingkat efektivitas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2021.



Gambar 4. 3 Grafik Rasio Efektivitas Kab Pamekasan Tahun 2017-2021

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Setelah melakukan pengukuran rasio efektivitas pada tabel 4.3 untuk tahun 2017-2021, selanjutnya menganalisis atau mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Berikut analisis *value for money* dalam mengukur kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten Pamekasan tahun 2017-2021 dengan rasio efektivitas:

a. Tahun 2017

Pada tahun 2017 realisasi pendapatan mencapai Rp1.906.203.284.544,28, melebihi anggaran pendapatan sebesar Rp1.858.293.158.524. Dengan rasio efektivitas sekitar 102,6%, kondisi ini dikategorikan sebagai "Efektif".

Tabel 4. 21 Anggaran dan Realisasi Komponen Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017

Komponen Pendapatan	Anggaran TA 2017		Realisasi TA 2017	
Pendapatan	Rp1.858.293.158.524	100,00%	Rp1.906.203.284.544	100,00%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 220.745.963.384	11,88%	Rp 243.311.843.020	12,76%
Pendapatan Transfer	Rp 1.580.632.285.140	85,06%	Rp 1.603.536.691.024	84,12%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 56.914.910.000	3,06%	Rp 59.354.750.500	3,11%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Terdapat beberapa komponen dalam anggaran dan realisasi pendapatan, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam tahun ini, kontribusi terbesar dalam anggaran dan realisasi pendapatan secara berturut-turut adalah pendapatan transfer, diikuti oleh pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

1) Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer TA 2017 sebesar Rp1.603.536.691.024 dengan persentase 84,12% melebihi anggaran pendapatan transfer sebesar Rp1.580.632.285.140 dengan persentase 85,06% dari jumlah pendapatan. Adapun komponen pendapatan transfer yang terdiri dari:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Komponen transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dalam pendapatan transfer pemerintah kabupaten Pamekasan TA 2017 merupakan salah satu komponen yang memberikan kontribusi lebih

besar dari ketiga komponen yang terdapat dalam pendapatan transfer. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan memiliki jumlah realisasi yang lebih rendah dari yang dianggarkan. Jumlah yang direalisasikan sebesar Rp1.337.421.843.722 dan Rp1.357.551.055.000 jumlah yang dianggarkan. **Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan** terdiri dari bagi hasil pajak (Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan 25 & 29), bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017 sebesar Rp847.776.564.000 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2017. Pada tahun ini terdapat ketidakcapaian Dana Alokasi Khusus yang disebabkan oleh beberapa bidang yang tidak menerima transfer dari pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) hingga akhir tahun yang disebabkan atas keterlambatan penyelesaian kegiatan DAK tersebut.

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2017 masing-masing sebesar Rp162.153.592.000 dan Rp161.483.324.376. Jumlah tersebut terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan dikontribusi oleh Dana Desa.

c) Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran dan realisasi **Transfer Pemerintah Provinsi** berupa bagi hasil pajak provinsi masing-masing sebesar Rp60.927.638.140 dan

Rp104.631.522.926. Komponen bagi hasil pajak terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, bagi hasil dari pajak rokok. Komponen pajak kendaraan bermotor TA 2017 merupakan jumlah yang dianggarkan paling tinggi, sedangkan yang memiliki jumlah realisasi tertinggi yaitu pajak rokok.

2) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah Kab Pamekasan TA 2017 sebesar Rp243.311.843.020,28 dengan persentase 12,76% lebih besar dari anggaran pendapatan asli daerah Rp220.745.963.384 dengan persentase 11,88% dari jumlah pendapatan. Adapun komponen pendapatan asli daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Komponen kedua yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah **lain-lain PAD yang sah** yaitu **pajak daerah** dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp25.968.783.596 dan Rp35.053.956.091 serta yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu pajak penerangan jalan sebesar Rp16.757.283.761, PBB (Perdesaan dan Perkotaan) sebesar Rp6.355.471.424, dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar Rp7.977.184.100.

b. Retribusi Daerah

Komponen ketiga yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah pajak daerah yaitu retribusi daerah dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp14.604.922.778 dan

Rp15.448.484.968, jumlah tersebut terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Komponen keempat yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah retribusi daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp1.868.949.377 dan Rp1.868.949.377,92 jumlah tersebut terdiri dari Bagian Laba Bank Jatim dan Bagian Laba UMKM Jatim.

d. Lain-lain PAD yang sah

Komponen pertama yang memberikan kontribusi lebih dominan yaitu **lain-lain PAD yang sah** dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp178.303.307.633 dan Rp190.940.452.583,36 yang mana sudah terealisasi dengan baik karena melebihi target yang dianggarkan. Jumlah tersebut didominasi oleh komponen pendapatan BLUD, Dana Kapitasi JKN, dan Dana Bos.

3) Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp59.354.750.500 dengan persentase 3,11% lebih besar dari anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp56.914.910.000 dengan persentase 3,06% dari jumlah pendapatan sehingga belum terealisasi dengan baik karena kurang dari target yang dianggarkan. Komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas pendapatan hibah dan bantuan keuangan provinsi.

a. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Pamekasan TA 2017 sebesar Rp5.369.150.500,00 merupakan penerusan dana hibah PDAM dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.500.000.000 dan Hibah untuk Program PKP-SPM (Pengembangan Kapasitas Penerapan- Standar Pelayanan Minimal) sebesar Rp1.429.025.500 dan Hibah Program WISMP (*Water Resources and irrigation Sector Management Program*) sebesar Rp2.440.125.000.

b. Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan keuangan provinsi memberikan kontribusi lebih besar dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp53.985.600.000. Komponen berupa Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan dalam bantuan keuangan provinsi merupakan komponen yang memiliki anggaran dan realisasi tertinggi sebesar Rp40.000.000.00. Selain itu pada tahun ini bantuan keuangan provinsi direalisasikan untuk program Terpadu TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) dan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur.

b. Tahun 2018

Pada tahun 2018, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran dan realisasi pendapatan di Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar 104,5% kondisi ini dikategorikan "Efektif". Persentase tersebut mengalami peningkatan sebanyak 1,9% dari tahun 2017 dengan persentasenya sebesar 102,6%. Hal ini terjadi karena pada TA 2018 realisasi pendapatan menunjukkan jumlah

Rp1.841.101.038.915 dan anggaran pendapatan sebesar Rp1.761.281.131.744. Hal tersebut menunjukkan kinerja tahun 2018 memiliki kinerja yang efektif dikarenakan realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran pendapatan hal tersebut sudah terealisasi dengan baik karena melebihi target yang dianggarkan. Meskipun rasio efektivitas TA 2018 lebih besar dari TA 2017 akan tetapi realisasi dan anggaran pendapatan tahun 2018 mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp65.102.245.629 dan Rp97.012.026.780 dari tahun 2017. Hal tersebut disebabkan terdapat penurunan realisasi TA 2018 berupa komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sedangkan lain-lain pendapatan yang sah jumlah realisasinya meningkat dari TA 2017.

Tabel 4. 22 Anggaran dan Realisasi Komponen Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018

Komponen Pendapatan	Anggaran TA 2018		Realisasi TA 2018	
Pendapatan	Rp1.761.281.131.744	100,00%	Rp1.841.101.038.915	100,00%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 179.974.568.986	10,22%	Rp 222.410.664.049	12,08%
Pendapatan Transfer	Rp 1.499.510.422.758	85,14%	Rp 1.542.898.734.866	83,80%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 81.796.140.000	4,64%	Rp 75.791.640.000	4,12%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Komponen realisasi dan anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi besar pada tahun ini yaitu pendapatan transfer lalu diikuti dengan pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

1) Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer TA 2018 sebesar Rp1.542.898.734.866 dengan persentase 83,80% lebih besar dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp1.499.510.422.758 dengan persentase 85,14% dari jumlah

pendapatan. Hal tersebut sudah terealisasi dengan baik karena melebihi target yang dianggarkan. Akan tetapi jumlah realisasi pendapatan transfer TA 2018 menurun sebesar Rp60.637.956.158 atau -3,8% dari tahun 2017.

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih dominan yaitu transfer pemerintah pusat – dana perimbangan, akan tetapi pada tahun 2018 jumlah realisasinya lebih besar dari anggarannya yang mana masing-masing sebesar Rp1.252.406.756.553 dan Rp1.241.155.382.500 serta jumlah realisasinya menurun dari tahun 2017 sebesar Rp85.015.087.169. Hal tersebut dapat diketahui penyebabnya dari uraian komponen Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak (PBB, Pajak Penghasilan 25 & 29, dan Pajak PPh 21), bagi hasil bukan pajak yang didominasi oleh bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan bagi hasil dari cukai tembakau, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Komponen bagi hasil pajak pada tahun 2017 tidak terdapat Pajak Penghasilan 21 sedangkan TA 2018 terdapat realisasinya sebesar Rp13.716.309.159 namun tidak dianggarkan. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 masing-masing sebesar Rp849.764.469.000 jumlah tersebut meningkat dari TA 2017. Terjadi penurunan jumlah realisasi dana alokasi khusus di tahun 2018 dan tidak tercapainya Dana Alokasi Khusus disebabkan karena terdapat beberapa bidang yang tidak ditransfer oleh pemerintah

pusat sampai akhir tahun yang disebabkan adanya keterlambatan penyelesaian kegiatan DAK tersebut.

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 masing-masing sebesar Rp188.617.892.000 dan Rp187.764.284.400. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017 nilai realisasinya sebesar Rp161.483.324.376 yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan didominasi oleh Dana Desa.

c) Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 masing-masing sebesar Rp69.737.148.258 dan Rp102.727.693.913. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang disebabkan oleh salah satu komponen bagi hasil pajak yang menurun berupa pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan bagi hasil dari pajak rokok.

2) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah TA 2018 mencapai Rp222.410.664.049 dengan persentase 12,08% melebihi anggaran sebesar Rp179.974.568.986 dengan persentase 10,22% dari jumlah pendapatan. Tetapi, terdapat penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai Rp243.311.843.020,28.

a. Pajak Daerah

Komponen kedua yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah lain-lain PAD yang sah yaitu pajak daerah dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp29.682.649.630 dan Rp36.520.160.896, hal tersebut terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2017 yang nominalnya sebesar Rp35.053.956.091. Komponen yang mengalami peningkatan dari tahun 2017 dan memberikan kontribusi tertinggi yaitu pajak penerangan jalan, PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar, dan BPHTB.

b. Retribusi Daerah

Komponen ketiga yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah pajak daerah yaitu retribusi daerah dengan masing-masing anggaran dan realisasi TA 2018 sebesar Rp14.841.970.458 dan Rp16.150.680.713,88 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2017 yang nominalnya sebesar Rp15.448.484.968, peningkatan jumlah tersebut terjadi karena meningkatnya retribusi jasa umum, menurunnya retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Komponen keempat yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah retribusi daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp1.923.442.124,00 jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun

sebelumnya yang mana terjadi peningkatan pada Bagian Laba Bank Jatim dan Bagian Laba UMKM Jatim.

d. Lain-lain PAD yang sah

Komponen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi lebih dominan yaitu lain-lain PAD yang sah dengan masing anggaran dan realisasi sebesar Rp133.526.506.77 dan Rp167.816.380.314 yang mana sudah terealisasi dengan baik karena melebihi target yang dianggarkan. Pada TA 2017 jumlah tersebut didominasi oleh komponen pendapatan BLUD, Dana kapitasi JKN, dan Dana Bos, akan tetapi pada TA 2018 tidak terdapat anggaran untuk Dana Bos.

3) Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2018 sebesar Rp75.791.640.000 dengan persentase 4,12% lebih rendah dari anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp81.796.140.000 dengan persentase 4,64% dari jumlah pendapatan yang mana belum terealisasi dengan baik karena kurang dari target yang dianggarkan. Komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas pendapatan hibah dan bantuan keuangan provinsi.

a. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 sebesar Rp54.083.440 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.089.000.000 Hibah Dana Bos SD sebesar

Rp42.697.440.000 dan Hibah Dana BOS SMP sebesar Rp10.297.000.000.

b. Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi dan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2018 sebesar Rp21.708.200.000. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari TA 2018 yang disebabkan realisasi Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) mengalami penurunan signifikan dengan jumlah Rp6.000.000.000 dari tahun 2017 sebesar Rp40.000.000.000. Terdapat dua program pada bantuan keuangan provinsi yang terdiri atas Program Terpadu TMMD (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman) dan BOP program Jalin Matra (Jalan Menuju Mandiri dan Sejahtera) (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

c. Tahun 2019

Pada tahun 2019, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran dan realisasi pendapatan di Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar 100,4% kondisi ini dikategorikan "Efektif". Persentase tersebut mengalami penurunan sebesar 4,1% dari tahun 2018 yang persentasenya sebesar 104,5%. Hal ini terjadi karena pada TA 2018 realisasi pendapatan menunjukkan jumlah Rp1.920.014.132.343 dan anggaran pendapatan sebesar Rp1.912.582.902.152. Hal ini menunjukkan kinerja tahun 2019 memiliki kinerja yang baik, yaitu realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran pendapatan hal tersebut sudah terealisasi dengan baik karena melebihi target yang dianggarkan. Meskipun

rasio efektivitas TA 2018 lebih besar dari TA 2019 akan tetapi realisasi dan anggaran pendapatan tahun 2019 mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp78.913.093.428 dan Rp151.301.770.408 dari tahun 2018. Hal tersebut disebabkan terdapat peningkatan realisasi TA 2019 berupa komponen pendapatan transfer sedangkan komponen pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah jumlah realisasinya menurun dari TA 2018.

Tabel 4. 23 Anggaran dan Realisasi Komponen Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019

Komponen Pendapatan	Anggaran TA 2019		Realisasi TA 2019	
Pendapatan	Rp1.912.582.902.152	100,00%	Rp1.920.014.132.343	100,00%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 177.941.072.561	9,30%	Rp 219.671.437.717	11,44%
Pendapatan Transfer	Rp 1.658.749.750.591	86,73%	Rp 1.629.757.515.626	84,88%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 75.892.079.000	3,97%	Rp 70.585.179.000	3,68%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Komponen realisasi dan anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi besar pada tahun ini yaitu pendapatan transfer lalu diikuti dengan pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

1) Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer TA 2019 sebesar Rp1.629.757.515.626 dengan persentase sebesar 84,88% lebih rendah dari anggaran pendapatan transfer Rp1.658.749.750.591 dengan persentase sebesar 86,73% dari jumlah pendapatan. Hal tersebut belum terealisasi dengan baik karena tidak memenuhi target yang dianggarkan. Jumlah realisasi pendapatan transfer TA 2019 meningkat sebesar Rp86.858.780.760 atau 5,6% dari tahun 2018.

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih dominan yaitu transfer pemerintah pusat – dana perimbangan, akan tetapi pada tahun 2019 jumlah realisasinya lebih rendah dari anggarannya yang mana masing-masing sebesar Rp1.297.089.273.637 dan Rp1.355.370.107.000 serta jumlah realisasinya meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp58.280.833.363. Hal tersebut dapat diketahui penyebabnya dari uraian komponen Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak (PBB, Pajak Penghasilan 25 & 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21), bagi hasil bukan pajak yang didominasi oleh bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan bagi hasil dari cukai tembakau, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 masing-masing sebesar Rp891.828.222.000 dan Rp892.340.709.000, jumlah tersebut meningkat dari TA 2018. Terjadi peningkatan jumlah realisasi dana alokasi khusus di tahun 2019 dan tidak tercapainya Dana Alokasi Khusus.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 masing-masing sebesar Rp213.056.452.000 dan Rp213.056.448.000. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 nilai realisasinya sebesar

Rp187.764.284.400 yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan didominasi oleh Dana Desa.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 masing-masing sebesar Rp90.323.191.591 dan Rp119.611.793.989. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh semua komponen bagi hasil pajak provinsi dengan pengecualian bagi hasil dari pajak rokok yang meningkat.

2) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 mencapai Rp219.671.437.717 dengan persentase sebesar 11,44%, melebihi anggaran sebesar Rp177.941.072.561 dengan persentase sebesar 9,3% dari jumlah pendapatan. Tetapi, terdapat penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp222.410.664.049.

a. Pajak Daerah

Komponen kedua yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah lain-lain PAD yang sah yaitu pajak daerah dengan masing-masing anggaran **dan realisasi sebesar** Rp33.584.208.080 dan Rp44.204.121.424, hal tersebut terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2018 yang nominalnya sebesar Rp36.520.160.896. Komponen yang mengalami peningkatan dari tahun

2017 dan memberikan kontribusi tertinggi yaitu pajak penerangan jalan, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB.

b. Retribusi Daerah

Komponen ketiga yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah pajak daerah yaitu retribusi daerah dengan masing-masing anggaran dan realisasi TA 2019 sebesar Rp16.471.312.353 dan Rp17.762.125.858 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2018 yang nominalnya sebesar Rp16.150.680.713, peningkatan jumlah tersebut terjadi karena meningkatnya retribusi jasa umum, menurunnya retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Komponen keempat yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah retribusi daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp1.847.294.966 dan Rp2.016.350.446 jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya yang mana terjadi peningkatan pada Bagian Laba Bank Jatim dan Bagian Laba UMKM Jatim.

d. Lain-lain PAD yang sah

Komponen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi lebih dominan yaitu lain-lain PAD yang sah dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp126.038.257.162 dan Rp155.688.839.988 yang mana sudah terealisasi dengan baik karena melebihi target yang dianggarkan. Pada TA 2019 jumlah tersebut

didominasi oleh komponen pendapatan BLUD dan Dana kapitasi JKN akan tetapi tidak terdapat anggaran untuk Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pendapatan dari Pengembalian.

3) Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2019 sebesar Rp70.585.179.000 dengan persentase sebesar 3,68% lebih rendah dari anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp75.892.079.000 dengan persentase sebesar 3,97% dari jumlah pendapatan yang mana belum terealisasi dengan baik karena kurang dari target yang dianggarkan. Komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan lainnya berupa bantuan keuangan provinsi.

a. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 sebesar Rp58.113.040.000, merupakan pendapatan hibah dari hibah dana bos, hibah dana bos kinerja dan hibah dana bos afirmasi.

b. Pendapatan Lainnya

Anggaran Pendapatan Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2019 telah terealisasi sempurna sebesar Rp12.472.139.000 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi. Terdapat program bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yaitu program lanjutan dari tahun sebelumnya yaitu BOP program Jalin

Matra (Jalan Menuju Mandiri dan Sejahtera) (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

d. Tahun 2020

Pada tahun 2020, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran dan realisasi pendapatan di Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar 99%. Persentase tersebut mengalami penurunan sebesar 1,4% dari tahun 2019 yang persentasenya sebesar 100,4%. Hal ini terjadi karena pada TA 2020 realisasi pendapatan sebesar Rp1.824.167.916.967, sedangkan anggaran pendapatan adalah Rp1.843.304.975.337 dan dikategorikan sebagai "Tidak Efektif". Rasio efektivitas TA 2019 lebih besar dari TA 2020 dikarenakan realisasi tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang membahayakan perekonomian Nasional khususnya Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut disebabkan terdapat penurunan realisasi TA 2020 berupa komponen pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah sedangkan komponen pendapatan asli daerah jumlah realisasinya meningkat. Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2020 mengambil kebijakan anggaran pendapatan dengan mengoreksi beberapa Penerimaan PAD terutama pajak daerah dan retribusi daerah yang terdampak pandemi Covid-19.

Tabel 4. 24 Anggaran dan Realisasi Komponen Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020

Komponen Pendapatan	Anggaran TA 2020		Realisasi TA 2020	
Pendapatan	Rp1.843.304.975.337	100,00%	Rp1.824.167.916.967	100,00%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 182.735.353.662	9,91%	Rp 232.262.477.005	12,73%
Pendapatan Transfer	Rp 1.589.769.454.675	86,25%	Rp 1.522.615.925.862	83,47%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 70.800.167.000	3,84%	Rp 69.289.514.100	3,80%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Komponen realisasi dan anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi besar pada tahun ini yaitu pendapatan transfer lalu diikuti dengan pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

1) Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer TA 2020 sebesar Rp1.522.615.925.862 dengan persentase sebesar 83,47% lebih rendah dari anggaran pendapatan transfer Rp1.589.769.454.675 dengan persentase sebesar 86,25% dari jumlah pendapatan. Hal tersebut belum terealisasi dengan baik karena tidak memenuhi target yang dianggarkan. Jumlah realisasi pendapatan transfer TA 2020 menurun sebesar Rp107.141.589.764 atau -6,6% dari tahun 2019.

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih dominan yaitu transfer pemerintah pusat – dana perimbangan, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah realisasinya lebih rendah dari anggarannya yang mana masing-masing sebesar Rp1.216.610.793.470 dan Rp1.178.649.523.958 serta jumlah realisasinya menurun dari tahun 2019 sebesar Rp118.439.749.679. Hal tersebut dapat diketahui penyebabnya dari uraian komponen Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak (PBB, Pajak Penghasilan 25 & 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21), bagi hasil bukan pajak yang didominasi oleh bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan bagi hasil dari cukai tembakau, DAU dan DAK.

Realisasi Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp800.743.381.000 dan Rp892.340.709.000 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 dan 2019 sebesar Rp259.560.355.000 dan Rp257.376.270.637, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Reguler sebesar dan DAK Non Fisik.

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 masing-masing sebesar Rp241.723.722.200 dan Rp243.080.838.800,. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2019 nilai realisasinya sebesar Rp213.056.448.000, yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan didominasi oleh Dana Desa.

c) Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 masing-masing sebesar Rp131.434.939.005 dan Rp100.885.563.104.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh semua komponen bagi hasil pajak yang menurun.

2) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah TA 2020 mencapai Rp232.262.477.005 dengan persentase sebesar 12,73%, melebihi anggaran sebesar Rp182.735.353.662 dengan persentase sebesar 9,91% dari jumlah pendapatan. Mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp219.671.437.717.

a. Pajak Daerah

Komponen kedua yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah lain-lain PAD yang sah yaitu pajak daerah dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp34.430.296.524 dan Rp37.192.592.664, hal tersebut terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2019 yang nominalnya sebesar Rp44.204.121.424.

Komponen yang mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi tertinggi yaitu pajak reklame, Pajak Parkir, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

b. Retribusi Daerah

Komponen ketiga yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah pajak daerah yaitu retribusi daerah dengan masing-masing anggaran dan realisasi TA 2019 sebesar Rp15.513.305.478 dan Rp16.517.650.380 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2019 yang nominalnya sebesar Rp17.762.125.858, penurunan

jumlah tersebut terjadi karena menurunnya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan terjadi peningkatan pada retribusi perizinan tertentu.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Komponen keempat yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah retribusi daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp1.847.294.966 dan Rp2.052.672.129 jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya yang mana terjadi peningkatan pada Bagian Laba Bank Jatim.

d. Lain-lain PAD yang sah

Komponen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi lebih dominan yaitu lain-lain PAD yang sah dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp130.944.456.694 dan Rp176.499.561.830 yang mana sudah terealisasi dengan baik karena melebihi target yang dianggarkan. Pada TA 2020 jumlah tersebut didominasi oleh komponen pendapatan BLUD dan Dana kapitasi JKN akan tetapi tidak terdapat anggaran untuk Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pendapatan dari Pengembalian.

3) Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2020 sebesar Rp69.289.514.100 dengan persentase sebesar 3,80% lebih rendah dari anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp70.800.167.000 dengan

persentase sebesar 3,84% dari jumlah pendapatan. Komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas pendapatan hibah dan bantuan keuangan provinsi.

a. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 sebesar Rp56.797.547.100, merupakan pendapatan hibah dari Hibah Dana BOS SD dan SMP. Serta terdapat anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp1.500.000.000 akan tetapi tidak direalisasikan.

b. Pendapatan Lainnya

Anggaran Pendapatan Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2020 sudah terealisasi sempurna sebesar Rp12.491.967.000 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang didominasi oleh Bantuan Keuangan Madin dan Guru Swasta (BPPDGS) (Dinas Pendidikan). Terdapat program bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yaitu Program Terpadu TMMMD ke 107 Tahun 2020 dan Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) *outcome* meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Yang Berkualitas.

e. Tahun 2021

Pada tahun 2021 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran dan realisasi pendapatan di Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar 97,0% kondisi ini dikategorikan "Tidak Efektif". Persentase tersebut mengalami penurunan

sebesar 2% dari tahun 2020 yang persentasenya sebesar 99%. Hal ini terjadi karena pada TA 2021 realisasi pendapatan menunjukkan jumlah sebesar Rp1.879.358.460.454 dan anggaran pendapatan sebesar Rp1.937.021.014.573. Pada TA 2020 realisasi pendapatan sebesar Rp1.824.167.916.967 dan anggaran pendapatan sebesar Rp1.843.304.975.337.

Tabel 4. 25 Anggaran dan Realisasi Komponen Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021

Komponen Pendapatan	Anggaran TA 2021		Realisasi TA 2021	
Pendapatan	Rp1.937.021.014.573	100,00%	Rp1.879.358.460.454	100,00%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 206.868.469.937	10,68%	Rp 205.969.039.947	10,96%
Pendapatan Transfer	Rp 1.631.167.747.628	84,21%	Rp 1.596.381.889.771	84,94%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 98.984.797.008	5,11%	Rp 77.007.530.736	4,10%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Rasio efektivitas TA 2020 lebih besar dari TA 2021 dikarenakan realisasi dan anggaran tahun 2021 mengalami peningkatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah sedangkan pendapatan asli daerah mengalami penurunan akibat dampak Pandemi COVID-19 yang membahayakan perekonomian kabupaten Pamekasan.

1) Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer TA 2021 sebesar Rp1.596.381.889.771 lebih rendah dari anggaran pendapatan transfer Rp1.631.167.747.628. Hal tersebut belum terealisasi dengan baik karena tidak memenuhi target yang dianggarkan. Jumlah realisasi pendapatan transfer TA 2021 menurun sebesar Rp73.765.963.909 dari tahun 2020.

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih dominan yaitu transfer pemerintah pusat – dana perimbangan, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah realisasinya meningkat dari anggarannya yang mana masing-masing sebesar Rp1.278.534.508.133 dan Rp1.239.252.236.584, serta jumlah realisasinya menurun dari tahun 2020. Hal tersebut dapat diketahui penyebabnya dari uraian komponen Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak (PBB, dan PPh Pasal 21), bagi hasil bukan pajak yang didominasi oleh bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan bagi hasil dari cukai tembakau, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Realisasi Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021 sebesar Rp791.549.034.000 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021 sebesar Rp301.827.566.000 dan Rp283.130.820.137, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Reguler sebesar dan DAK Non Fisik.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021 masing-masing sebesar Rp224.424.623.000 dan Rp224.290.009.800. Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 yang terdiri dari Dana Insentif Daerah dan didominasi oleh Dana Desa.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2021 masing-masing sebesar 128.208.616.495 dan Rp132.839.643.387. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh semua komponen bagi hasil pajak yang meningkat.

2) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah TA 2021 sebesar Rp205.969.039.947, lebih rendah dari anggaran sebesar Rp206.869.469.937. Mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2020.

a. Pajak Daerah

Komponen kedua yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah lain-lain PAD yang sah yaitu pajak daerah dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp42.570.650.387 dan Rp38.503.953.058, hal tersebut terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2020. Komponen yang mengalami

peningkatan dan memberikan kontribusi tertinggi yaitu pajak hotel, Pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

b. Retribusi Daerah

Komponen ketiga yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah pajak daerah yaitu retribusi daerah dengan masing-masing anggaran dan realisasi TA 2021 sebesar Rp12.086.747.418 dan Rp10.053.688.754 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2020 yang nominalnya sebesar Rp16.517.650.380, penurunan jumlah tersebut terjadi karena menurunnya retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan terjadi peningkatan pada retribusi jasa usaha.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Komponen keempat yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah setelah retribusi daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp1.854.888.227 dan Rp2.080.932.532 jumlah tersebut berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD merupakan penerimaan dividen dari Bank Jatim dan BPR Jatim.

d. Lain-lain PAD yang sah

Komponen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi lebih dominan yaitu lain-lain PAD yang sah dengan masing-masing anggaran dan realisasi sebesar Rp150.356.183.905 dan Rp155.330.465.602 yang mana sudah terealisasi dengan baik karena

melebihi target yang dianggarkan. Pada TA 2021 jumlah tersebut didominasi oleh komponen pendapatan BLUD. Komponen Dana kapitasi JKN tidak terdapat anggaran dan realisasi pada tahun ini.

3) Lain- Lain Pendapatan yang Sah

a. Pendapatan Lainnya

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 sebesar Rp77.007.530.736 lebih rendah dari anggaran sebesar Rp98.984.797.008. Komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas pendapatan lainnya berupa bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, Hibah Dana BOS, dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Realisasi Pendapatan Lainnya merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang didominasi oleh Bantuan Keuangan Madin dan Guru Swasta (Dinas Pendidikan). Terdapat program bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yaitu Program Terpadu TMMD dan Program JATIM PUSPA *outcome* meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Yang Berkualitas.

Pada tahun 2018, Pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan menghadapi situasi di mana rasio efektivitas mengalami peningkatan dari tahun 2017 meskipun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan jumlah kenaikan realisasi pendapatan tahun 2018. Tahun 2019-2021 terus mengalami penurunan rasio efektivitas. Tahun 2019 terjadi penurunan jumlah

realisasi. Tahun 2020-2021 realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan anggaran pendapatan hal tersebut tidak pernah melebihi target disebabkan karena sumber pendapatan daerah tidak sepenuhnya memberikan pemasukan terhadap pendapatan daerah. Sumber pendapatan Kabupaten Pamekasan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer Pusat atau Provinsi. Hal ini karena pemerintah daerah masih didominasi dan mengandalkan dana dari pemerintah pusat daripada potensial daerahnya sendiri.

